

**PENERAPAN AKUNTANSI RAHN PADA PERUM PEGADAIAN
SYARIAH CABANG AHMAD YANI PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E, Sy.)*



OLEH:

ALID INDRIANI
NIM. 10925006235

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1434 H/2013 M**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : **PENERAPAN AKUNTANSI RAHN PADA PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI PEKANBARU.**

Penelitian ini dilakukan di Pekanbaru yang berlangsung pada bulan Februari sampai dengan Juni 2013. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah yang diterapkan Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani telah sesuai dengan PSAK 107 (*akad Ijarah*). Dan mengetahui kesesuaian gadai emas syariah di Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani dengan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002.

Penelitian ini dilakukan di Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani Pekanbaru. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan atas pembiayaan gadai syariah yang diterapkan Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru sesuai dengan PSAK 107. Dan untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, documenter, penelitian kepustakaan. Teknik analisa data menggunakan metode analisa *deskriptif kualitatif*, sedangkan teknik penulisan yaitu secara *deduktif, induktif, deskriptif*. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan terkait dengan penelitian ini yang berjumlah 9 orang. Sedangkan sampelnya ditela'ah dengan teknik purposive sampling, dimana kepala bagian pembukuannya (supervisor) dan Dewan Pengawasan Syariah saja yang dijadikan sampelnya berjumlah 2 orang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah *rahn* pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru sudah sesuai dengan PSAK 107 (*akan Ijarah*), dan pembiayaan gadai emas syariah telah sesuai dengan Fatwa DSN – MUI No.26/DSN-MUI/III/2002.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

حماية الشريعة والقانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052, Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : rector@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul: **“PENERAPAN AKUNTANSI RAHN PADA PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI PEKANBARU”** yang ditulis oleh:

Nama : ALID INDRIANI

NIM : 10925006235

Jurusan : Ekonomi Islam

Telah di munaqasyahkan dalam Sidang Panitia Sarjana Program S1 pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 03 Oktober 2013

Bertepatan : 29 Dzulhijjah 1434 H

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy).

Pekanbaru, 17 Oktober 2013

Dekan,

Dr. H. AKBARIZAN, MA, M.Pd.
NIP. 19711001 199503 1 002

PANITIA UJIAN SARJANA

KETUA

SEKRETARIS

M. KASTULANI, SH.MH.
NIP. 19630909 199002 1 001

M. ABDI ALMAKTSUR, MA.
NIP. 19720701 199803 1 003

PENGUJI I

PENGUJI II

ZURAIDAH, MA.
NIP. 19710812 199603 2 001

ZULFAHMI NUR, MA.
NIP. 19720922 200501 1 004

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga skripsi yang berjudul “PENERAPAN AKUNTANSI RAHN PADA PERUM PEGADAIAN SYARIAH CABANG AHMAD YANI PEKANBARU” ini dapat diselesaikan sebagaimana mestinya. Shalawat dan salam penulis hadiahkan kepada Nabi junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW, semoga senantiasa mendapatkan syafaat darinya. Aamiin...

Skripsi ini merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa strata satu (S1), Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau. Untuk itu, penulis telah melaksanakan penelitian pada Perum Pegadaian Syariah, yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Pekanbaru, Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bantuan dari semua pihak, oleh karena itu penulis ingin berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan motivasi dan kerja sama selama menyelesaikan skripsi ini, diantaranya:

1. Kedua orang tua yaitu ayahanda (Amril Rabain) dan ibunda (Lasti) tercinta yang telah memberikan motivasi, do’a, dukungan moril maupun materil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tidak lupa pula buat semua keluarga yang ikut mendoakan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektor UIN Suska Riau dan seluruh jajaran civitas akademik UIN Suska Riau

3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau beserta wakil Dekan I, II, III dan seluruh Dosen
4. Bapak Mawardi, S.Ag., M.Si. dan Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Zulfahmi Nur, M.A. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini
6. Bapak Firdaus, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademis yang telah membantu dan memberikan nasehat kepada penulis
7. Pimpinan serta seluruh karyawan Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru yang telah memberikan informasi, bimbingan dan ilmunya selama pelaksanaan penelitian skripsi.
8. Dan untuk semua teman-teman yang selalu memberikan dukungan, motivasi, dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalaamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, Juni 2013

ALID INDRIANI
NIM. 10925006235

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	13

BAB II GAMBARAN UMUM PERUM PEGADAIAN

A. Sejarah Dan Perkembangan Perum Pegadaian Indonesia	15
B. Visi dan misi perum pegadaian Indonesia	18
1. Visi Perum Pegadaian	18
2. Misi Perum Pegadaian	19
C. Struktur Organisasi Perum Pegadaian Syari'ah	20
D. Produk-produk Perum Pegadaian Syariah	26

BAB III LANDASAN TEORI

A. Pengertian Akuntansi Syari'ah	31
B. Pengertian Gadai Syariah	33
C. Landasan Gadai dalam Islam	36
D. Rukun dan Syarat Gadai Syariah	41
E. Gadai Emas dan Mekanisme Produk di Pegadaian Syariah	43
1. Gadai Emas	43
2. Mekanisme Produk Gadai Emas di Pegadain syari'ah	47
F. Pegadain Syariah	50
1. Definisi Pegadaian Syariah	50
2. Asas, Tujuan, dan Fungsi Pegadaian Syariah	52
3. Asumsi Dasar Akuntansi Pegadaian Syariah	54
G. Tinjauan tentang Akuntansi Ijarah (PSAK 107)	55

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah.....	62
B. Kesesuaian Praktik Gadai Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional	74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	80
B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya pertumbuhan bisnis dalam berbagai bidang di Indonesia maupun di dunia mendorong adanya kebutuhan yang tinggi akan akuntansi. Adanya kebutuhan ini merupakan implikasi yang wajar.¹ hal ini ditandai oleh berkembangnya institusi keuangan, seperti bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, dan lain – lain.

Akuntansi adalah seperangkat pengetahuan yang berupa alat dan seni untuk mencatat dan mengelompokkan dan mengiktisarkan serta menafsirkan hasil transaksi keuangan yang menghasilkan konsep, prinsip, standar, prosedur, dalam rangka menyediakan informasi yang berarti sebagai pertanggungjawaban manajemen kepada pihak – pihak yang berkepentingan dan diolah dalam sebuah system.

Setiap pegawai dalam perusahaan dari level yang paling bawah hingga manajer dan pemilik perusahaan sangat memiliki keterkaitan dengan bidang Akuntansi. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam perusahaan maka semakin membutuhkan informasi yang dihasilkan oleh bidang akuntansi. Akuntansi juga memberikan informasi kepada pihak – pihak yang berkepentingan untuk mengetahui kinerja ekonomi dan kondisi perusahaan.²

¹ Sri Nirhayati, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009), h.1

² Niswonger & Warren & Reves & Fress, *Prinsip – Prinsip Akuntansi*, (Jakarta : Erlangga, 1999), h.6

Kemunculan dan perkembangan lembaga keuangan islam di Indonesia yang sangat fenomenal, telah memicu lahirnya diskusi – diskusi serius lebih lanjut, mulai dari produk atau jasa yang ditawarkan, pola manajemen lembaga sampai kepada pola akuntansinya. Aspek akuntansi badan usaha memang selalu menarik untuk dijadikan kajian dan bahan diskusi, apalagi bila badan tersebut mempunyai kekhasan tersendiri seperti halnya lembaga keuangan islam. Menariknya akuntansi untuk dibahas tentu karena adanya beberapa alasan. Pertama, akuntansi selama ini dikenal sebagai alat komunikasi atau sering diistilahkan sebagai bahasa bisnis. Kedua, akuntansi sering diperdebatkan apakah iya netral atau tidak. Ketiga, akuntansi sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia dikembangkan. Dan Keempat, akuntansi mempunyai peranan yang sangat penting karena apa yang dihasilkannya bisa menjadi sumber atau dasar legitimasi sebuah keputusan penting dan menentukan.³

Namun kaitannya dengan syari'ah, maka seorang akunting harus memiliki 4 sifat dasar dalam melakukan perhitungan – perhitungan, yakni kejujuran, keadilan, kebijakan, dan kepatuhan terhadap nilai – nilai syari'ah yang berimplikasi pada sebuah tanggung jawab, bukan hanya kepada atasan dan masyarakat yang terkait tetapi ganjaran Allah SWT, yakni mengandung konsekuensi pertanggungjawaban dunia dan akhirat.⁴

Akuntansi dalam konsep islam sebagai kumpulan dasar – dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber – sumber hukum islam

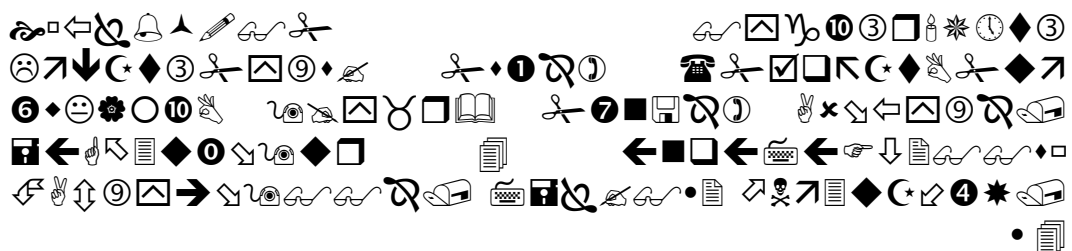
³ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h. 127

⁴ Hasbi Ramli, *Teori Dasar Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta : Renaisan, 2005), h.14

dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan.

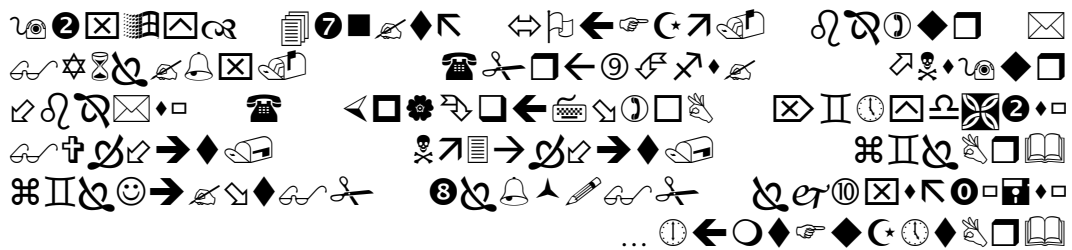
Adanya landasan utana yang dijadikan dasar hukum akuntansi syari'ah adalah :

Firman Allah SWT dalam Al – Qur'an sebagai pedoman pembukuan, dijelaskan dalam surah Al – Baqarah (2): 282 yang berbunyi :



Artinya: “Hai orang – orang yang beriman, apabila kalian melakukan muamalat atau transaksi secara tidak tunai untuk waktu yang telah ditentukan, maka catatlah (bukukanlah),...”

Dan juga Firman Allah SWT dalam Al – Qur'an yang dijelaskan dalam surah Al – Baqarah (2): 283 yang berbunyi:



Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang...”

Di Indonesia kewajiban melakukan pembukuan setiap perusahaan di dasarkan pada Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 6 yang berbunyi “Tiap – tiap orang yang melakukan / menjalankan perusahaan menyelenggarakan pembukuan perusahaan, sehingga diketahui segala hak dan kewajibannya”. Tujuan yang akan dicapai adalah untuk memperoleh informasi

tentang transaksi keuangan dan transaksi barang agar dapat ditentukan dengan tepat kebijakan perusahaan selanjutnya.⁵

Keberadaan Akuntansi dalam sebuah lembaga keuangan atau transaksi menjadi wajib adanya. Karena melalui akuntansilah, seseorang dapat mengetahui secara baik dan benar laporan keuangan terhadap transaksi, neraca atau laba rugi yang pernah dilakukan.⁶

Pegadaian adalah suatu lembaga perkreditan tertua bercorak khusus, berdiri sejak zaman penjajahan belanda dan telah dikenal masyarakat sejak lama, khususnya masyarakat golongan berpenghasilan menengah dan bawah. Pegadaian mempunyai tugas memberi pelayanan jasa kredit berupa pinjaman uang dengan jaminan barang bergerak

Berdasarkan peraturan pemerintah RI No 178 tanggal 03 Mei 1961 jawatan pegadaian di rubah menjadi perusahaan Negara (PN) pegadaian sebagai badan usaha Negara dibawah naungan departemen keuangan. Dengan terbitnya inpres No. 17 tahun 1967 dan peraturan pemerintah No. 7 tahun 1969, perusahaan Negara (PN) pegadaian beralih statusnya menjadi perusahaan jawatan (PERJAN) pegadaian.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 dan peraturan pemerintah No. 103 tahun 2000 tanggal 10 November 2000 , Perjan pegadaian berubah menjadi Perum Pegadaian.

Perum pegadaian sampai saat ini merupakan satu – satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hokum diperbolehkan melakukan

⁵ Yadiati & Wahyudi, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2008), h.23

⁶ Hasbi Ramli, *Op.Cit*, h.20

pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Tugas pokok perum pegadaian adalah menjembatani kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik – praktik lintah darat. Kantor pusat perum pegadaian berkedudukan di Jakarta dan dibantu oleh kantor daerah, kantor perwakilan daerah, dan kantor cabang. Jaringan usaha perum pegadaian telah meliputi lebih dari 500 cabang yang tersebar di wilayah Indonesia.

Belakangan bersamaan dengan perkembangan produk – produk berbasis syariah yang kian marak di Indonesia, sector pegadaian juga ikut mengalaminya. Pegadaian syari'ah hadir di Indonesia dalam bentuk kerjasama bank syari'ah dengan perum pegadaian membentuk unit layanan gadai syari'ah di beberapa kota di Indonesia. Disamping itu ada pula bank syari'ah yang menjalankan kegiatan pegadaian syariah sendiri.

Pegadaian syari'ah dalam menjalankan operasionalnya berpegang pada prinsip syari'ah. Pada dasarnya produk – produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti tidak memengut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil. Payung hukum gadai syari'ah dalam hal pemenuhan prinsip – prinsip syari'ah berpegang pada fatwa DSN – MUI No. 25 / DSN – MUI / III / 2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk rahn diperbolehkan,

dan fatwa DSN – MUI No. 26 / DSN – MUI / III / 2002 tentang gadai emas. Sedangkan dalam aspek kelembagaan tetap menginduk kepada preturan pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990.⁷

Salah satu jasa Perum Pegadaian yang merupakan sumber pendapatan dan keuntungan adalah Produk Rahn, sistem rahn memiliki peranan yang penting dalam mempertahankan aktifitas bisnis, dimanapun bisnis itu beroperasi.

Dalam operasionalnya, transaksi Perum Pegadaian Syari'ah haruslah bermanfaat, sehingga menimbulkan nilai tambah dari setiap transaksi berbasis syari'ah, yaitu (1) bebas bunga, (2) prinsip bagi hasil dan resiko, (3) perhitungan bagi hasil tidak dilakukan dimuka, hanya nisbah bagi hasilnya yang ditentukan dimuka, Perum Pegadaian Syari'ah menghitung hasil setelah periode akuntansi berakhir.

Dalam Rahn barang gadaian tidak otomatis menjadi milik pihak yang menerima gadai sebagai ganti piutangnya. Dengan kata lain fungsi Rahn di tangan pemberi utang hanya berfungsi sebagai jaminan utang dari orang yang berhutang. Namun barang gadaian tetap milik orang yang berhutang.

Akad Rahn bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berhutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan, namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai dan biaya hanya harus ditanggung orang yang menggadai. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Apabila barang gadaian dapat diambil manfaatnya, untuk barang gadai

⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h.384

berupa emas tentu tidak ada biaya pemeliharaan, yang ada adalah biaya penyimpanan. Penentuan besarnya biaya penyimpanan dilakukan dengan akad ijarah.

Semakin besarnya minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah, maka pegadaian syariah yang merupakan salah satu lembaga yang menyediakan produk tersebut harus tetap dikawal agar tidak ada yang melakukan penyimpangan terhadap sistem yang telah ada karena dapat merusak citra pegadaian syariah di mata masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan dalam hal ini difokuskan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah agar masyarakat yang telah menggunakan produk tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dan untuk masyarakat yang belum memanfaatkan produk pembiayaan menjadi yakin dan tertarik dengan produk tersebut.

Pembiayaan gadai syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara pegadaian syariah yang satu dengan yang lain. Pada penerapan sistem syariah, tentu mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang berbeda dengan perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya. Kebutuhan dalam menetapkan metode pengukuran akuntansi, terutama pembiayaan gadai syariah harus disesuaikan dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan syariah yang telah diatur.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSNMUI/III/2002 dengan akad ijarah (PSAK 107) merupakan panduan dalam pengakuan, pengukuran penyajian, dan pengungkapan yang berhubungan dengan pembiayaan gadai syariah. PSAK ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008. Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 dan dengan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad ijarah (PSAK 107) untuk pembiayaan dengan gadai syariah akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan pegadaian syariah karena peraturan tersebut merupakan formulasi yang dibuat oleh para pakar ekonomi syariah dan para akuntan di IAI. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat akan bertambah dalam memanfaatkan produk pembiayaan gadai syariah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perlakuan akuntansi pada pembiayaan gadai syariah, sehingga menjadi latar belakang penulis untuk mengadakan penelitian. Untuk itu sebagai mahasiswa Ekonomi Islam, penulis tertarik untuk mengupas lebih dalam tentang Sistem Ekonomi Islam ini, terutama tentang Perum Pegadaian Syari'ah. penulis mencoba untuk mengangkat persoalan ini dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul **“Penerapan Akuntansi Rahn Pada Perum Pegadaian Cabang Ahmad Yani Pekanbaru”**

B. Rumusan Masalah

Agar terarahnya penelitian ini dan tidak terjadi interpretasi yang keliru terhadap hasil penelitian, maka penulis memfokuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah yang diterapkan Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Ahmad Yani telah sesuai dengan PSAK 107 (*akad ijarah*)?
2. Mengetahui kesesuaian gadai emas syariah di Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani dengan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan dan objek penelitian yang diteliti, maka penulis memberikan batasan yaitu hanya pada perlakuan akuntansi gadai emas dan bukan membahas tentang gadai dengan barang jaminan benda lain selain emas.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah yang diterapkan Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Ahmad Yani telah sesuai dengan PSAK 107 (*akad ijarah*)
- b. Untuk mengetahui Mengetahui kesesuaian gadai emas syariah di Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani dengan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002

2. Manfaat Penelitian :

- a. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program S1 pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Jurusan Ekonomi Islam pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau.

- b. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak manajemen Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Ahmad Yani terutama dalam penerapan akuntansi syari'ah.
- c. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya yang berminat melakukan kajian pada bidang yang sama serta hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan secara umumnya

E. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian dan analisis masalah yang berhubungan dengan penulisan skripsi, metode yang digunakan sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Ahmad Yani yang berlokasi di JL. Ahmad Yani Pekanbaru. Berdasarkan wawancara yang pernah penulis lakukan dengan pimpinan cabang terindikasikan permasalahan - permasalahan tentang penerapan akuntansi pada bank tersebut sebagaimana yang disampaikan pada bagian latar belakang.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek adalah kepala bagian pembukuan dan karyawan pada Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Ahmad Yani.
- b. Objeknya adalah Penerapan Akuntansi Rahn pada Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Ahmad Yani.

3. Populasi dan Sample

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan terkait dengan penelitian ini yang terdiri dari 9 orang. Sedangkan sampelnya ditela'ah dengan teknik Purposive Sampling, dimana kepala bagian pembukuannya (supervisor) dan dewan Pengawas Syari'ah saja yang dijadikan sampel berjumlah 2 orang.

4. Jenis dan sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapatkan dari sumber pertama baik dari individu maupun perorangan. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Kepala Bagian Pembukuan (Supervisor) Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Ahmad Yani

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak yang lain yang telah dipublikasikan dalam hal ini dokumen-dokumen ataupun data lainnya terutama yang berhubungan dengan Akuntansi Rahn

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara yaitu melakukan wawancara langsung atau melakukan tanya jawab dengan kepala bagian pembukuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penerapan akuntansi *rahn* di pegadaian tersebut.

- b. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung bagaimana kegiatan yang terjadi di pegadaian tersebut dan melakukan pencatatan yang dianggap perlu apabila terjadi perbedaan konsep yang ada antara pegadaian yang bersangkutan dengan teori yang ada.
- c. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data atau arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti data keuangan dan struktur organisasi.
- d. Penelitian Pustaka yaitu dengan memperoleh berbagai informasi dari berbagai referensi seperti buku-buku yang berhubungan dengan masalah Dokumentasi yang diteliti.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu metode yang memberikan gambaran secara umum dan sistematis, faktual dan akurat tentang objek penelitian dengan meneliti dan membahas data yang ada untuk dianalisis, kemudian membandingkan antara kenyataan yang terdapat di perusahaan dengan teori yang telah dipelajari dan diambil kesimpulan.

7. Teknik penulisan

- a. Metode deduktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Induktif adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara umum.

- c. Metode Deskriptif adalah setelah semua data sudah berhasil terkumpul, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pembahasan ini dan mudah memahaminya, maka penulis menguraikan, memaparkan secara singkat isi masing-masing bab sebagai berikut :

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, yaitu tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, aktifitas perusahaan serta visi misi perusahaan.

BAB III : Pada bab ini membahas landasan teoritis yang mendukung pembahasan masalah untuk dapat melakukan pembahasan terhadap penelitian lebih lanjut. Meliputi : Pengertian Akuntansi Syariah, Pengertian Gadai Syariah, Landasan Gadai Syariah, Rukun dan Syarat Gadai Syariah, Gadai Syariah dan Mekanisme Produk Pegadaian Syariah, Pegadaian Syariah, Tinjauan Tentang Akuntansi Ijarah.

BAB IV : Pada bab ini memaparkan hasil penelitian tentang penerapan akuntansi rahn pada Perum Pegadaian Syaria'h Cabang Ahmad Yani dan pembahasan.

BAB V : Pada bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang diharapkan memberikan manfaat bagi semuanya khususnya penulis dan perusahaan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUM PEGADAIAN

A. Sejarah Dan Perkembangan Perum Pegadaian Indonesia

Pada abad XVII datang suatu maskapai perdagangan dari Belanda *vereenigde oost indische compagnie* (VOC) datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Dalam rangka memperlancar perekonomian VOC dengan membuka Bank Van Leening. Bank Van Leening yaitu lembaga kredit yang memberikan kredit dengan system gadai. Bank Van Leening didirikan di Batavia 20 Agustus 1746 berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Van Lmhof.

Pada tahun 1800 Belanda membuburkan VOC di Indonesia berdasarkan kekuasaan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda melalui Gubernur Jenderal Daendels mengeluarkan peraturan yang merinci jenis barang gadai yang dapat digadaikan seperti emas, perak, kain, dan sebagian perabot rumah tangga yang bisa disimpan dalam waktu relatif singkat⁸.

Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan atas Indonesia dari Belanda (1811 – 1816). Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles membubarkan Bank Van Leening dan mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian dengan izin dari pemerintah setempat. Dari izin ini pemerintah memperoleh tambahan pendapatan.

Ketika Belanda kembali ke Indonesia (1816) pemerintah Belanda melihat bahwa pegadaian yang didirikan oleh pemerintah Inggris banyak yang merugikan

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah*, (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 80

masyarakat, pemegang hak banyak melakukan penyelewangan, mengambil keuntungan untuk diri sendiri dengan menetapkan bunga pinjaman sewenang – wenang. Pada tahun 1900 Belanda menyarankan agar kegiatan pegadaian ditangani sendiri oleh pemerintah sehingga dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat peminjam.

Berdasarkan penelitian tersebut, pemerintah mengeluarkan staatsblad No. 131 tanggal 12 Maret 1901 yang pada prinsipnya mengatakan bahwa pendirian pegadaian merupakan monopoli dan karena itu hanya bisa di jalankan oleh pemerintah

Berdasarkan undang – undang ini maka didirikanlah pegadaian Negara pertama di kota Sukabumi Jawa Barat pada tanggal 01 april 1901 kemudian tanggal 01 April di peringati sebagai hari pegadaian.

Pegadaian adalah suatu lembaga perkreditan tertua bercorak khusus, berdiri sejak zaman penjajahan belanda dan telah dikenal masyarakat sejak lama, khususnya masyarakat golongan berpenghasilan menengah dan bawah. Pegadaian mempunyai tugas memberi pelayanan jasa kredit berupa pinjaman uang dengan jaminan barang bergerak

Berdasarkan peraturan pemerintah RI No 178 tanggal 03 Mei 1961 jawatan pegadaian di rubah menjadi perusahaan Negara (PN) pegadaian sebagai badan usaha Negara dibawah naungan dapartemen keuangan. Dengan terbitnya inpres No. 17 tahun 1967 dan peraturan pemerintah No. 7 tahun 1969, perusahaan Negara (PN) pegadaian beralih statusnya menjadi perusahaan jawatan (PERJAN) pegadaian.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 10 tahun 1990 tanggal 10 April 1990 dan peraturan pemerintah No. 103 tahun 2000 tanggal 10 November 2000 , Perjan pegadaian berubah menjadi Perum Pegadaian.⁹ Pegadaian dengan usahanya adalah penyediaan bagi kemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan dan bertujuan untuk:

1. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku
2. Menghindarkan msyarakat dari gadai gelap, praktek riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya

Dengan mengindahkan prinsip – prinsip ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan Negara, perusahaan menyelenggarakan usaha sebagai berikut:

1. Penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai
2. Penyaluran uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia (kepercayaan), pelayanan jasa titipan, pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batuadi serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan dengan persetujuan menteri keuangan

Selain penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, perusahaan menjalankan usaha jasa gadai syariah (Rahn) sejak tanggal 10 Januari 2003 tempatnya di Jakarta dengan Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika.

⁹ *Ibid.*, h. 83

Badan lembaga ini bersifat mandiri dan tidak terpengaruh secara langsung oleh gejolak moneter baik dalam negeri maupun internasional. Badan ini telah disesuaikan agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku di dalamnya dan akan memperkaya khasanah lembaga keuangan Indonesia.

Operasionalisme pengadaian pra fatwa MUI tanggal 16 desember 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep syariah. Adapun beberapa pihak yang menepis anggapan itu. Setelah melalui beberapa kajian yang cukup panjang, akhirnya disusunlah sebuah konsep pendirian Unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal adanya divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah. Sebuah konsep ini mengacu pada sistem administrasi modern, yaitu asas rasionalitas, efisiensi dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam dan yang mempunyai bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengolahannya dari usaha gadai konvensional. Pengadaian syariah mempunyai fungsi dalam beroperasi yaitu yang dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian syariah/Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) sebagai satu unit sebuah organisasi dibawah pembinaan divisi usaha lain perum pegadaian.

B. Visi dan misi perum pegadaian Indonesia

1. Visi Perum Pegadaian

“pegadaian pada tahun 2013 menjadi champion dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fidusia bagi masyarakat golongan menengah ke bawah”¹⁰

¹⁰ Annual Report

Dalam mengantisipasi undang – undang gadai swasta dapat dipahami bahwa persaingan ke depan semakin ketat karena siapapun pemilik modal akan mampu dan terjun pada bidang usaha ini. Sebelum para pesaing memasuki industri gadai, pegadaian sudah harus mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin pasar. Persiapan harus dimulai dengan langkah pasti yaitu dengan membuka sebanyak mungkin outlet dimana masyarakat akan lebih mudah untuk menggapainya.

Sasarannya adalah untuk memberi kemudahan bagi pengusaha mikro dan kecil karena terbukti bahwa mereka inilah yang dapat bertahan menghadapi krisis global yang melanda dunia tahun 1997 yang lalu. Peranan usaha mikro dan kecil perlu di tingkatkan dengan tersedianya pendanaan yang cepat dan aman yang di sediakan pegadaian.

Visi pegadaian yang telah ditetapkan di atas tidaklah sesuatu yang mustahil untuk dicapai, tekad sudah dipegang erat dan seluruh daya dan upaya dikerahkan untuk mewujudkannya.

2. Misi Perum Pegadaian

Dari maksud dan tujuan perum pegadaian tersebut di atas, perum pegadaian merumuskan misi perusahaan menyangkut batasan bidang bisnis yang akan di garap. Sasaran pasar yang dituju dan upaya peningkatan kemanfaatan perum pegadaian kepada stakeholders. Rumusan misi perum pegadaian di nyatakan dengan kalimat sebagai berikut :

1. Membantu program pemerintah meningkatkan meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan

memberi solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman kepada usaha skala mikro dan menengah atas hukum gadai dan fidusia.

2. Memberikan manfaat kepada pemengku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya

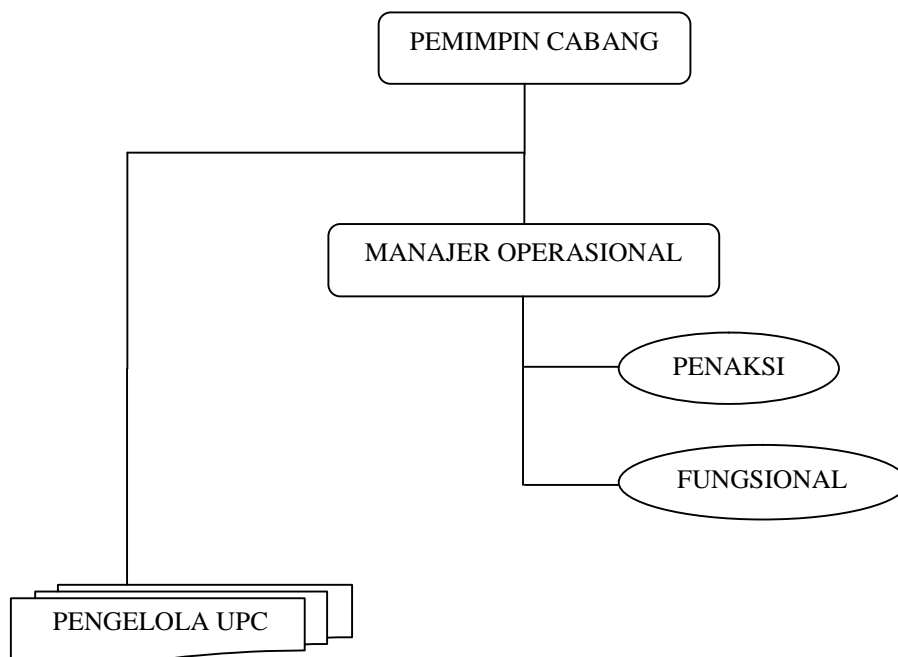
C. Struktur Organisasi Perum Pegadaian Syari'ah

Struktur organisasi adalah susunan komponen – komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain dari pada struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.¹¹

Struktur Organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana, memperlihatkan wewenang dan tanggung jawab baik secara vertical maupun horizontal serta memberikan gambaran tentang satuan – satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjelaskan hubungan – hubungan yang ada untuk mengkoordinir, tingkatan – tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi. Berikut ini adalah Struktur Organisasi Perum Pegadaian:

¹¹ Adiwarman karim, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001). H 30

STRUKTUR ORGANISASI PERUM PEGADAIAN



Struktur Organisasi mempunyai arti penting dan sangat bermanfaat dalam mencapai tujuan dari Perum Pegadaian Syariah yang disusun dengan ketentuan yang berlaku.¹² Tujuannya adalah menjelaskan segala fungsi kewajiban dan tanggung jawab personil pada masing – masing bidang yang sudah ditetapkan.

Adapun tugas masing – masing personil antara lain :

1. Pemimpin Cabang

Adalah seorang yang mempunyai fungsi merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kegiatan operasional, administrasi, dan keuangan serta usaha gadai dan usaha lain kantor cabang serta Unit Pelayanan Cabang (UPC). Peminpin Cabang mempunyai tugas :

¹² *Ibid.*

- a. Menyusun rencana kerja serta anggaran kantor cabang dan UPC berdasarkan acuan yang telah ditetapkan
- b. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional usaha gadai dan usaha lain
- c. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional UPC
- d. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional penata usahaan barang jaminan bermasalah
- e. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional pengelolaan modal kerja
- f. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional pengelolaan administrasi serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor cabang
- g. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional kebutuhan dan penggunaan sarana prasarana, serta kebersihan dan ketertiban kantor cabang dan UPC
- h. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan operasional pemasaran dan pelayanan konsumen
- i. Mewakili kepentingan perusahaan baik kedalam maupun keluar berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh atasan.

2. Manajer Operasional

Mempunyai fungsi merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi penetapan harga taksiran, penetapan

kelayakan kredit, penetapan besaran uang pinjaman, administrasi, keuangan, serta pembuatan laporan kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain pada kantor cabang. Manajer Operasional mempunyai tugas :

- a. Merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain
- b. Menangani barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, palsu dan barang polisi) barang jaminan lewat jatuh tempo, kredit macet serta asuransi kredit
- c. Melaksanakan pengawasan serta uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan yang masuk, serta pengawasan survey secara berkala dan terprogram
- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi administrasi, keuangan, sarana prasarana, keamanan serta pembuatan laporan kegiatan operasional kantor cabang
- e. Merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi penerimaan dan pembayaran serta pengelolaan modal kerja

3. Pengelola UPC

Mempunyai fungsi mengkoordinasikan, melaksanakan, mengawasi kegiatan operasional, mengawasi administrasi, keuangan, keamanan, ketertiban, dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan UPC. Pengelola UPC mempunyai tugas :

- a. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional UPC

- b. Menangani barang jaminan bermasalah dan barang jaminan lewat jatuh tempo
- c. Melaksanakan pengawasan secara uji petik dan terprogram terhadap barang jaminan uang masuk
- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi administrasi, keuangan, sarana prasarana, keamanan, ketertiban dan kebersihan serta pembuatan laporan kegiatan operasional UPC

4. Penaksir

Mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar dan citra baik perusahaan, serta mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan. Penaksir mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikan dalam rangka menetapkan dan menentukan golongan taksiran dan uang pinjaman
- b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang untuk mengetahui mutu dan nilai, dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang
- c. Merencanakan dan menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan agar terjamin keamanannya

- d. Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang
- e. Mengorganisasikan pelaksanaan tugas pekerjaan pendukung administrasi dan pembayaran
- f. Membimbing pendukung administrasi dan pembayaran dalam rangka pembinaan dan kelancaran tugas pekerjaan

5. Fungsional

Petugas fungsional mempunyai fungsi merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain di kantor cabang dan UPC. Petugas fungsional mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan kegiatan pemasaran usaha gadai dan usaha lain yang ada di kantor cabang dan UPC
- b. Menyelenggarakan kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain yang ada di kantor cabang dan UPC
- c. Mengumpulkan dan mengelola data kegiatan operasional usaha gadai dan usaha lain yang ada di kantor cabang dan UPC
- d. Menyusun dan menyajikan data statistik usaha gadai dan usaha lain dalam bentuk laporan

D. Produk-produk Perum Pegadaian Syariah

Produk Pembiayaan yang diberikan Perum Pegadaian Syaria'ah yaitu¹³ :

1. Kredit (pinjaman) angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem gadai. KRASIDA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah.
2. Pembiayaan RAHN dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Jaminannya barang perhiasan, barang elektronik atau kendaraan bermotor anda. Lima belas menit dana pun cair.
3. KREASI adalah Kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Mikro Kecil dan menengah (UMKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem Fidusia. Sistem Fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. KREASI merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah.
4. KRISTA adalah kredit yang diberikan kepada para wanita wirausaha yang tergabung dalam kelompok untuk pengembangan usaha dengan sistem tanggung renteng. KRISTA merupakan solusi terpercaya bagi wanita untuk mendapatkan kredit pengembangan usaha yang cepat dan mudah
5. Program AMANAH pembiayaan berprinsip syariah dari Pegadaian melayani anda karyawan swasta atau pegawai negeri untuk memiliki motor atau mobil idaman.

¹³ www.pegadaian.co.id

6. Pembiayaan ARRUM dari Pegadaian Syariah memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari.
7. Kremada merupakan produk Wujudkan rumah idaman yang nyaman dengan pinjaman untuk renovasi maupun pembangunan rumah baru. Pinjaman (kredit) lunak yang diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk kebutuhan renovasi atau pembangunan rumah. Nasabah yang tergolong masyarakat berpenghasilan rendah adalah yang memiliki penghasilan kurang dari 2 juta perbulan. Nasabah tergabung dalam suatu kelompok usaha.
8. Kredit multi guna Kredit (pinjaman) angsuran bulanan dengan sistem FIDUSIA yang diperuntukkan bagi pegawai atau karyawan suatu instansi yang telah memiliki penghasilan tetap. Layanan KAGUM dapat diperoleh di perusahaan atau instansi yang telah menjalin kerjasama dengan Pegadaian KAGUM dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegunaan seperti membangun dan merenovasi rumah, biaya sekolah, biaya pengobatan, pernikahan dan lain sebagainya. KAGUM merupakan solusi pembiayaan yang cepat dan tepat bagi karyawan.
9. Kredit multi guna Kredit (pinjaman) angsuran bulanan dengan sistem FIDUSIA yang diperuntukkan bagi pegawai atau karyawan suatu instansi yang telah memiliki penghasilan tetap. Layanan KAGUM dapat diperoleh di perusahaan atau instansi yang telah menjalin kerjasama dengan Pegadaian KAGUM dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegunaan

seperti membangun dan merenovasi rumah, biaya sekolah, biaya pengobatan, pernikahan dan lain sebagainya. KAGUM merupakan solusi pembiayaan yang cepat dan tepat bagi karyawan.

10. Pinjaman dengan system gadai yang diberikan kepada nasabah perseorangan maupun institusi dalam jangka waktu tertentu dengan jaminan berbentuk saham dan obligasi yang tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Layanan INVESTA bertujuan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek para pelaku pasar modal secara cepat, aman dan terpercaya.
11. Kredit tunda jual gabah Pinjaman atau talangan dana cepat kepada petani saat panen raya dengan jaminan gabah kering giling (GKG) untuk digunakan menutup biaya hidup dan modal budidaya. Dengan penyediaan modal budidaya yang cukup diharapkan para petani dapat memperoleh modal lebih cepat untuk usaha pertanian pada periode musim tanam berikutnya. Selanjutnya dengan usaha yang bersifat lindung nilai gabah ini, diharapkan mereka dapat memperoleh daya saing dipasar domestik sehingga memberikan peluang tambahan pendapatan dan sekaligus memberikan pendidikan bagi para petani untuk menjadikan hasil panen sebagai komoditas bisnis.

Aneka jasa yang ditawarkan oleh Perum Pegadaian Syari'ah yaitu¹⁴ :

1. Layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya kompetitif yang bekerjasama dengan beberapa remiten

¹⁴ *Ibid.*

berskala internasional. KUCICA merupakan solusi terpercaya untuk kirim dan terima uang kapanpun dan dimanapun secara instan, cepat dan aman

2. Multi pembayaran online Layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti Listrik, Telepon, PDAM dan lain sebagainya secara online di outlet Pegadaian di seluruh Indonesia. Merupakan solusi pembayaran cepat yang memberi kemudahan nasabah dalam bertransaksi tanpa harus memiliki rekening di bank
3. Persewaan gedung Auditorium yang dikelola oleh Pegadaian untuk disewakan kepada masyarakat luas guna keperluan berbagai kegiatan acara dan seremoni. Auditorium dengan arsitektur Belanda yang dipadukan dengan interior elegan nan artistik serta dilengkapi sarana dan prasarana yang memadai, dapat menjadi tempat ideal guna mensukseskan setiap momen berharga anda.
4. Jasa sertifikasi batu mulia Batu permata adalah aset berharga yang banyak diminati masyarakat untuk koleksi maupun investasi. Namun tak semua orang bisa membedakan batu permata secara ilmiah, baik dari jenis (spesies dan varitas), manipulasi warna dan kejernihan, bahkan untuk batu sintetik sekalipun. Sehingga sering berakibat kerugian dan kekecewaan setelah bertransaksi. Batu mulia alami terdiri atas 120 spesies dan diturunkan menjadi lebih dari 500 varitas. Peralatan identifikasi gemologi pun bersifat sangat ilmiah dan canggih sehingga membuat masyarakat awam sulit mengakses ilmu gemologi dan akhirnya sering menjadi objek penipuan dalam bisnis batu mulia. Pegadaian G-Lab menyediakan

berbagai layanan professional untuk sertifikasi keaslian dan identifikasi kualitas batu permata, dengan dukungan gemologist dan peralatan gemologi berstandar internasional dari Gemological Institute of America

5. Jasa taksiran Layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui karatase dan kualitas harta perhiasan emas, berlian dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis. Dengan biaya yang relatif ringan masyarakat dapat mengetahui tentang karatase dan kualitas suatu barang berharga miliknya. Sehingga diharapkan masyarakat tidak mengalami kebimbangan atas nilai pasti investasinya.
6. Jasa titipan Layanan kepada nasabah yang ingin menitipkan barang berharga yang dimilikinya seperti perhiasan emas, berlian, surat berharga, maupun kendaraan bermotor dengan biaya terjangkau. Dalam dunia perbankan, layanan ini dikenal sebagai safe deposit box. Jika mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga dirumah sendiri saat akan dinas keluar kota atau luar negeri, menunaikan ibadah haji, berlibur, sekolah diluar negeri, dan kepentingan lainnya. Maka percayakan barang berharga milik Anda kepada Pegadaian, karena keamanan adalah menjadi prioritas kami

BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Akuntansi Syari'ah

Secara Etimologi, kata akuntansi berasal dari bahasa Inggris, *accounting*, dalam bahasa arab disebut “*muhasabah*” yang berasal dari kata *hasaba*, *hasibah*, *muhasabah*, artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasi, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu.¹⁵ Sedangkan secara terminologi akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.

Akuntansi syariah menurut Iwan Triyuwono merupakan salah satu upaya mendekonstruksikan akuntansi modern kedalam bentuk yang humanis dan syarat nilai.¹⁶ Akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, pendataan, dan pelaporan melalui proses perhitungan yang terkait dengan transaksi keuangan sebagai bahan informasi dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung *zhulum* (kezaliman), *riba*, *maysir* (judi), *gharar* (penipuan), barang yang diharamkan, dan membahayakan.¹⁷

¹⁵ Hasbi Rambli, *Teori Dasar Akuntansi Syariah*, (Jakarta : Renaisan, 2005), h. 12

¹⁶ Iwan Triwuyono, *Perspektif Metodologi Teori Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h. 196

¹⁷ Hasbi Ramli, *Loc. Cit*

Akuntansi syariah memiliki beberapa prinsip umum yang perlu dipegang teguh dalam pelaksanaannya sehari-hari :

1. Prinsip Pertanggung jawaban

Pertanggung jawaban (*Accountability*) yaitu merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan muslim. Pertanggung jawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa pertanggung jawaban apa yang telah diamanatkan, wujud pertanggung jawabannya biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

2. Prinsip keadilan

Dalam konteks akuntansi, bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya bila nilai transaksi adalah sebesar Rp 100 juta, maka akuntansi perusahaan akan mencatatnya dengan jumlah yang sama.

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran tidak dapat lepas dari prinsip keadilan. Akuntansi akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandasi dengan nilai kebenaran. Kebenaran didalam Al – Qur'an tidak diperbolehkan untuk di campur adukan dengan kebathilan.¹⁸

¹⁸ Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syariah*, (Jakarta : PT.Salemba Empat Patria, 2002), h.

B. Pengertian Gadai Syariah

Dalam Fiqh muamalah dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut *ar-rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan hutang. *Ar-rahn* (gadai) menurut bahasa berarti *al-tsubut* dan *al-habs* yaitu penetapan dan penahanan. Dan ada pula yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat, di samping itu *rahn* diartikan pula secara bahasa dengan tetap, kekal, dan jaminan.¹⁹

Menurut istilah syara' *ar-rahn* terdapat beberapa pengertian di antaranya :

1. Gadai adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang
2. Gadai adalah suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam hutang piutang
3. Akad yang objeknya menahan harga terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya.²⁰

Sedang menurut pendapat Syafe'I Antonio, *Ar-rahn* (gadai) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.²¹

Gadai (*Rahn*) adalah suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang

¹⁹ H.Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Cet. I ; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 105

²⁰ *Ibid.*, h. 105-106

²¹ Muh. Syafei Antinio, *Bank Syariah & Dari Teori Ke Praktik* (Cet. I ; Jakarta : Gema Insani Press, 2003), h. 128

berhutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Sedangkan BUMN hanya berfungsi memberikan pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.²²

Gadai (*Rahn*) adalah kegiatan menjaminkan barang – barang berharga kepada pihak tertentu, guna memperoleh sejumlah uang dan barang yang dijaminkan akan ditebus kembali sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan lembaga gadai.²³

Dalam hal gadai Ghufroon A. Mas'adi, mengemukakan bahwa yang dimaksud *ar-rahn* (gadai) adalah sebuah akad piutang yang disertai dengan jaminan (agunan).²⁴ Sedangkan di dalam syari'ah, *ar-rahn* itu berarti memegang sesuatu yang mempunyai nilai, bila pemberian itu dilakukan pada waktu terjadinya hutang.²⁵

Dalam fiqh sunnah, menurut bahasa *Rahn* adalah tetap dan lestari, seperti juga dinamai *al-habsu* artinya penahanan, seperti dikatakan Ni'matun Rahinah, artinya karunia yang tetap dan lestari.²⁶

Rahn dalam hukum islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong dan tidak untuk mencari keuntungan. Sedangkan gadai dalam hukum perdata, di samping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan melalui sistem bunga atau sewa modal yang ditetapkan di muka. Dalam hukum islam tidak dikenal “bunga uang”, dengan demikian dalam transaksi *rahn* (gadai syari'ah)

²² Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syari'ah* (Bandung : Alfabeta, 2011), h. 1

²³ Dicki Hartanto, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2012), h. 94

²⁴ Ghufroon A.M. As'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 175-176

²⁵ A. Rahman I. Doi, *Muamalah Syari'ah III* (Cet. I ; Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 72

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12* (Cet. I ; Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1987), h. 150

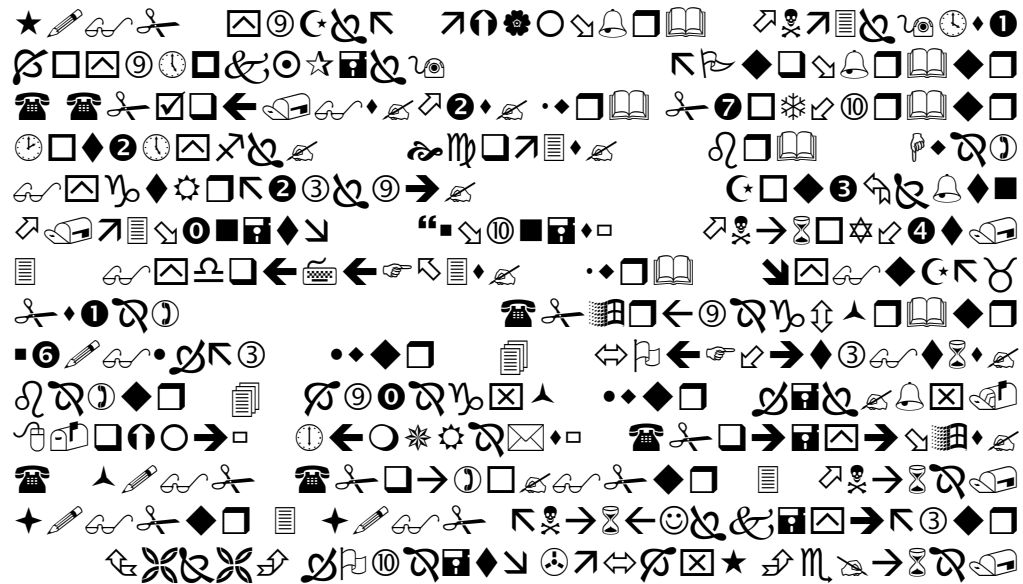
pemberi gadai tidak dikenakan tambahan pembayaran atas pinjaman yang diterimanya. Namun demikian masih dimungkinkan bagi penerima gadai untuk memperoleh imbalan berupa sewa tempat penyimpanan *marhun* (barang jaminan/agunan).²⁷

Sedangkan pengertian gadai yang dalam Pasal 1150 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang. Oleh karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut sebagai barang jaminan atau agunan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa gadai (*rahn*) adalah harta yang dijadikan oleh pemiliknya sebagai jaminan utang dan kepercayaan terhadap utang, yang dapat dijadikan (seluruh atau sebagiannya) untuk pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya.

Secara tegas *ar-rahn* (gadai) adalah memberikan suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan/pegangan manakala salah si peminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan di antara keduanya, agar si pemberi pinjaman tidak ragu atas pengembalian barang yang dipinjamnya.

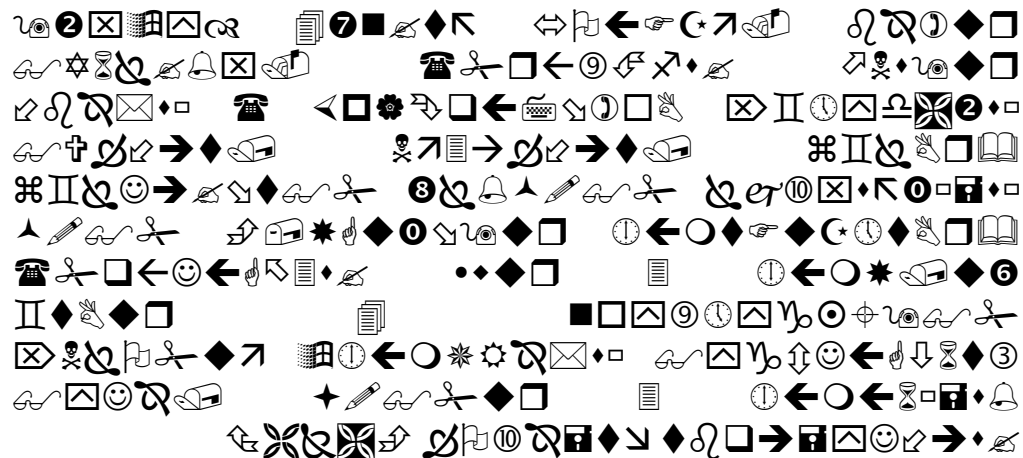
²⁷ Annual Report Perum Pegadaian Syariah



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya

hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

2. Al-Qur'an Al-Baqarah (2): 283



Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, hendaklah ada barang tanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

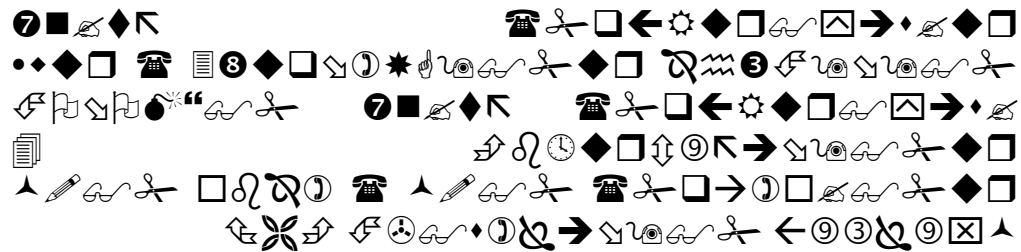
Ayat ini menerangkan dalam hal muamalah yang tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (jaminan) yang dipegang oleh pihak yang berpiutang. Kecuali jika masing - masing percaya mempercayai dan menyerahkan/ berserah diri kepada Allah, maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa adanya barang tanggungan.

Ayat ini tidaklah menetapkan bahwa jaminan itu hanya boleh dilakukan dengan syarat dalam perjalanan, muamalah tidak dengan tunai dan

tidak ada juru tulis, tetapi ayat ini hanya menyatakan bahwa dalam keadaan tersebut boleh dilakukan muamalah dengan memakai jaminan.

Dalam keadaan yang lain boleh juga memakai jaminan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Bukhari bahwa Nabi Muhammad saw pernah menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi di Madinah.

3. Al-Qur'an Al Maidah(5): 2



Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Hadits

1. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a. berkata:

“Aisyah RA berkata bahwa Rasulullah Saw membeli bahan makan dari sorang Yahudi dengan cara berhutang dan beliau menjamin kepadanya baju besi”. (HR. Al-Bukhari no 2513 dan Muslim no 1603)

Selain Al-Qur'an dan Hadits gadai syariah juga merujuk pada Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai syariah (*Ar-Rahn*) yang menetapkan hukum bahwa Gadai Syariah dibolehkan, dengan ketentuan

sebagaimana diatur dalam fatwa. Adapun ketentuan mengenai akad *Rahn* tersebut yakni:

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua: Ketentuan Umum

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
 - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi utangnya.

- b. Apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/ dieksekusi melalui lelang/jual sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.²⁸

Sedangkan untuk gadai emas syariah, menurut Fatwa DSN No.26/DSNMUI/III/2002 harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut :

- a. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
- b. Rahn emas boleh digunakan berdasarkan prinsip *Ar-Rahn*.
- c. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
- d. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.²⁹

D. Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu gadai syariah, diantaranya:

- 1. Rukun gadai
 - a. Pelaku, terdiri atas *ar-rahin* (yang menggadaikan) dan *al-murtahin* (yang menerima gadai).

²⁸ Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002, h. 3

²⁹ Fatwa DSN No.26/DSNMUI/III/2002, h. 2-3

- b. *Al-Marhun* yaitu barang yang digunakan *rahn* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
- c. *Al-Marhun bih* (Utang), Syarat utang adalah wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditur, utang tersebut dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas (harus spesifik).
- d. *Sighat, Ijab dan Qabul*.³⁰

Apabila semua ketentuan yang telah disebutkan terpenuhi, sesuai ketentuan syariah, dan dilakukan oleh orang yang layak melakukan *tasharruf*, maka akad *ar-rahn* tersebut sudah sah

2. Syarat gadai

- a. Sighat, dengan syarat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.
- b. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum, yang ditandai dengan *aqil baligh, berakal sehat dan mampu melakukan akad*.
- c. Utang (*Marhun Bih*) mempunyai pengertian bahwa utang adalah kewajiban bagi pihak yang berutang untuk membayar kepada pihak yang member piutang, barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, dan barang tersebut dapat dimanfaatkan.
- d. *Marhun* adalah harta yang dipegang oleh *murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya sebagai jaminan utang.³¹

³⁰ Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 385

³¹ *Ibid.*, h. 385

Secara umum transaksi yang digunakan dalam pegadaian syariah adalah transaksi yang menggunakan dua akad yaitu (a) akad rahn dan (b) akad ijarah. Meskipun, secara konsep kedua akad dimaksud, sesungguhnya mempunyai perbedaan. Namun, dalam teknis pelaksanaannya. Maka nasabah (*rahin*) tidak perlu mengadakan akad dua kali. Akad yang digunakan pada Rahn yaitu :

- a. *Akad Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, lembaga keuangan syariah menahan barang bergerak sebagai jaminan atas uang nasabah.
- b. *Akad Ijarah*. Dalam gadai syariah dengan akad ijarah, penerima gadai dapat menyewakan tempat penyimpanan barang kepada nasabahnya. Berarti nasabah (*rahin*) memberikan fee kepada *murtahin* ketika masa kontrak berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*.³²

Mekanisme operasional melalui akad *rahn* nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan lagi bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Pegadaian syariah akan memperoleh keuntungan hanya dari

³² *Ibid.*, h. 387

biaya sewa tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang diperhitungkan dari uang pinjaman.³³

E. Gadai Emas dan Mekanisme Produk di Pegadaian Syariah

1. Gadai Emas

Gadai Emas di pegadaian syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk lantakan ataupun perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Cepat dari pihak nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang rumit dan waktu yang relatif lebih lama dibandingkan dengan bank. Aman dari pihak pegadaian, karena pegadaian memiliki barang jaminan yaitu emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil bahkan nilainya cenderung bertambah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikannya dengan mengembalikan sejumlah uang pinjaman dari pegadaian, sedangkan mudah dari pihak pegadaian yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikan pinjamannya (utang) maka pegadaian dengan mudah dapat menjualnya dengan harga yang bersaing karena nilai emas yang stabil bahkan bertambah. Prinsip yang digunakan dalam gadai emas syariah baik di pegadaian syariah ataupun di bank syariah tidak berbeda dengan prinsip gadai pada umumnya. Mulai dari persyaratan, biaya (ongkos) administrasi, biaya

³³ *Ibid.*, h. 388

pemeliharaan/ penyimpanan, hingga mekanisme penjualan barang gadaian ketika pihak yang menggadaikan tidak dapat melunasi utangnya.

Gadai emas memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan barang gadaian lainnya. Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dan harganya relative stabil bahkan selalu menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya. Emas juga merupakan barang atau harta yang dapat dengan mudah dimiliki oleh setiap orang khususnya emas dalam bentuk perhiasan.

Ketika seseorang membutuhkan uang tunai, maka ia dapat dengan mudah menggadaikan perhiasannya kepada lembaga penggadaian atau bank syariah. Setelah ia dapat melunasi utangnya, ia dapat memiliki kembali perhiasannya. Artinya, seseorang dengan mudah mendapatkan uang tunai tanpa harus menjual emas atau perhiasan yang dimilikinya.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam gadai emas syariah baik di pegadaian maupun di lembaga yang menawarkan produk gadai emas syariah. Hal yang dimaksud adalah biaya administrasi dan biaya pemeliharaan.

a. Biaya Administrasi

Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan formulir yang dikeluarkan oleh pegadaian dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (rahin). Pada umumnya ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai. Oleh karena itu, biaya administrasi gadai dibebankan kepada

penggadai. Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan pegadaian, maka pihak pegadaian yang lebih mengetahui dalam menghitung rincian biaya administrasi. Setelah pegadaian menghitung total biaya administrasi, kemudian nasabah atau penggadai mengganti biaya administrasi tersebut.

Namun, tidak banyak atau bahkan sangat jarang nasabah yang mengetahui rincian biaya administrasi tersebut. Pegadaian hanya menginformasikan total biaya administrasi yang harus ditanggung oleh nasabah atau penggadai tanpa menyebutkan rinciannya. Keterbukaan dalam menginformasikan rincian biaya administrasi tersebut sangat penting dalam rangka keterbukaan yang kaitannya dengan ridha bi ridha, karena biaya administrasi tersebut dibebankan kepada nasabah atau penggadai.³⁴

Dewan Syariah Nasional dalam Fatwa No. 26/ DSN-MUI/ III/2002 menyebutkan bahwa biaya atau ongkos yang ditanggung oleh penggadai besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.³⁵ Artinya, penggadai harus mengetahui besar rincian dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh pegadaian untuk melaksanakan akad gadai, seperti biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, foto copy, print out,

³⁴ Afis, Fungsional, Wawancara, Pekanbaru, Tanggal 16 Juni 2013

³⁵ Fatwa, *Op.Cit.* No 26, h. 3

dll. Sehingga hal tersebut yang juga menyebabkan biaya administrasi harus dibayar di depan.

b. Biaya Pemeliharaan

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (rahin).³⁶ Karena pada dasarnya penggadai (rahin) masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut, sehingga dia bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya.

Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad ijarah (sewa). Artinya, penggadai (rahin) menyewa tempat di pegadaian untuk menyimpan atau menitipkan barang gadainya, kemudian pegadaian menetapkan biaya sewa tempat. Dalam pengertian lainnya, penggadai (rahin) menggunakan jasa pegadaian untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir.

Biaya pemeliharaan / penyimpanan ataupun biaya sewa tersebut diperbolehkan oleh para ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad ijarah. Biaya pemeliharaan / penyimpanan / sewa dapat berupa biaya sewa tempat SDB (*Save Deposit Box*), biaya pemeliharaan, biaya

³⁶ Fatwa, *Op.Cit.* No 25, h. 3

keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut.³⁷

Dengan akad ijarah dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian pegadaian dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Pegadaian akan mendapatkan *fee* atau upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai.

Oleh karena itu, gadai emas syariah sangat bermanfaat bagi penggadai yang membutuhkan dana tunai dengan cepat dan bagi pihak pegadain yang menyediakan jasa gadai emas syariah karena pegadaian akan mendapatkan pemasukan atau keuntungan dari jasa penitipan barang gadaian dan bukan dari kegiatan gadai itu sendiri.

2. Mekanisme Produk Gadai Emas di Pegadain syari'ah

Mekanisme operasional pegadaian syariah merupakan implementasi dari konsep dasar Rahn yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqh. Secara teknis, pelaksanaan atau kegiatan pegadaian syariah adalah:

1. Jenis barang yang digadaikan
2. Perhiasan: emas, perak, mutiara, intan dan sejenisnya.
3. Peralatan rumah tangga: perlengkapan dapur, perlengkapan makan/minum, perlengkapan bertanam, dan sebagainya.

³⁷ Afis, Fungsional, Wawancara, tanggal 16 Juni 2013

4. Biaya Kendaraan: sepeda ontel, sepeda motor, mobil, dan sebagainya.

Biaya-biaya yang dikenakan dalam pegadaian syariah meliputi biaya administrasi dan biaya penyimpanan barang gadai.

Operasi pegadaian syari'ah menggambarkan hubungan diantara nasabah dengan pegadaian. Adapun teknis pegadaian syari'ah adalah sebagai berikut : 1) Nasabah menjaminkan barang kepada pegadaian syari'ah untuk mendapatkan pembiayaan dan kemudian pegadaian menaksir barang jaminan untuk dijadikan dasar dalam melaksanakan pembiayaan. 2) pegadaian syari'ah dan nasabah menyetujui akaq. 3) pegadaian syari'ah menerima biaya gadai, seperti biaya penitipan barang, biaya pemeliharaan, penjagaan dan biaya penaksiran yang dibayar pada pelunasan atau perpanjangan transaksi oleh nasabah. 4) nasabah menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo.³⁸

Bagi calon nasabah yang ingin memperoleh pinjaman dengan cara :

- a. Calon nasabah datang langsung ke loket penaksir dan menyerahkan barang yang akan dijaminkan dengan menunjukkan KTP atau surat kuasa apabila pemilik barang tidak bisa datang sendiri.
- b. Barang jaminan tersebut diteliti kualitasnya untuk menaksir dan menetapkan harganya.

³⁸ Dicki Hartanto, *Bank & Lembaga Keuangan Lain*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2012), h. 105

- c. Setelah proses tersebut, pembayaran uang pinjaman dilakukan oleh kasir tanpa ada potongan biaya apapun kecuali potongan biaya administrasi.³⁹

Untuk pengembalian pinjaman, prosedur yang harus dilalui nasabah adalah sebagai berikut :

- a. Uang pinjaman dapat dilunasi setiap saat tanpa harus menunggu jatuh tempo
- b. Jumlah yang harus dibayar nasabah adalah penjumlahan dari pinjaman ditambah biaya sewa (*ijarah*) yang dibayar langsung kepada kasir dengan menyertakan surat gadai.
- c. Kemudian barang dikeluarkan oleh petugas dan dikembalikan kepada nasabah.⁴⁰

Selanjutnya pihak pegadaian syariah akan melakukan analisis pinjaman yang meliputi :

- 1. Petugas pegadaian memeriksa kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat calon pemohon peminjam.
- 2. Penaksir melakukan analisis terhadap data pemohon, keaslian dan karatase jaminan berupa emas, sumber pengembalian pinjaman, penampilan atau tingkah laku calon nasabah yang mencurigakan.
- 3. Jika menurut analisis, pemohon layak maka pegadaian akan menerbitkan pinjaman dengan gadai emas. Jumlah pinjaman disesuaikan dengan maksimal pinjaman sebesar 95% dari taksiran emas yang disesuaikan dengan harga standar.

³⁹ Afis, Fungsional, Wawancara, Tanggal 16 Juni 2013

⁴⁰ *Ibid.*

4. Realisasi pinjaman dapat dicairkan setelah akad pinjaman sesuai dengan ketentuan pegadaian.
5. Nasabah dikenakan biaya administrasi, biaya sewa dari jumlah pinjaman.
6. Pelunasan dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo
7. Apabila sampai dengan waktu yang ditetapkan nasabah tidak dapat melunasi dan proses kolektibilitas tidak dapat dilakukan, maka jaminan dijual di bawah tangan dengan ketentuan :
 - 1) Nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo pinjaman dan tidak diperbaharui
 - 2) Diupayakan sepengetahuan nasabah dan kepada nasabah diberikan kesempatan untuk mencari calon pemilik. Apabila tidak dapat dilakukan, maka pegadaian menjual berdasarkan harga tertinggi dan wajar (karyawan pegadaian tidak diperkenankan memiliki agunan tersebut)⁴¹

F. Pegadain Syariah

1. Definisi Pegadaian Syariah

Syariah berasal dari kata bahasa Arab yang secara harfiah berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mesti dilaluinya.

⁴¹ Slamet, Pimpinan Upc, *Wawancara*, Tanggal 25 Mei 2013

Pegadaian adalah bentuk lembaga pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha gadai yang diperuntukkan bagi masyarakat luas berpenghasilan rendah yang membutuhkan dana dalam waktu segera.⁴²

Pegadaian syariah sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat guna menetapkan pilihan dalam pembiayaan. Biasanya masyarakat yang berhubungan dengan pegadaian adalah masyarakat menengah ke bawah yang membutuhkan pembiayaan jangka pendek dengan margin yang rendah. Oleh karena itu, barang jaminan pegadaian dari masyarakat ini memiliki karakteristik barang sehari – hari yang mempunyai nilai dalam prinsip, operasional, maupun produknya dikembangkan dengan berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan petunjuk-petunjuk operasional pada hadis Muhammad Rasulullah SAW. Pegadaian Syariah berarti pegadaian yang tata cara operasionalnya didasari dengan tata cara Islam yang mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Al Hadits. Prinsip utama yang diikuti Pegadaian Islam yaitu:

1. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi
2. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah
3. Memberikan atau mengeluarkan zakat.

⁴² Dicki Hartanto, *Op.Cit.*, h. 93-94

2. Asas, Tujuan, dan Fungsi Pegadaian Syariah

Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang berpiutang tersebut memberikan kekuasaan yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berpiutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.⁴³

Sifat usaha pegadaian pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Oleh karena itu Perum Pegadaian bertujuan sebagai berikut :

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan/pinjaman atas dasar hukum gadai.
2. Pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, dan pinjaman tidak wajar lainnya.
3. Pemanfaatan gadai bebas bunga pada gadai syariah memiliki efek jaring pengaman social karena masyarakat yang butuh dana mendesak tidak lagi dijerat pinjaman/pembiayaan berbasis bunga.

⁴³ Andri Soemitra, *Op.cit*, h. 383

4. Membantu orang-orang yang membutuhkan pinjaman dengan syarat mudah.⁴⁴

Adapun fungsi pegadaian antara lain :

1. Bagi nasabah : tersedianya dana dengan prosedur yang relative lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan/kredit perbankan. Di samping itu, nasabah juga mendapat manfaat penaksiran nilai suatu barang bergerak secara professional. Mendapatkan fasilitas penitipan barang bergerak yang aman dan dapat dipercaya.
2. Bagi perusahaan pegadaian :
 - a. Penghasilan yang bersumber dari sewa modal yang dibayarkan oleh peminjam dana.
 - b. Penghasilan yang bersumber dari ongkos yang dibayarkan oleh nasabah memperoleh jasa tertentu. Bagi bank syariah yang mengeluarkan produk gadai syariah dapat mendapat keuntungan dari pembebanan biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan emas.
 - c. Pelaksanaan misi perum pegadaian sebagai BUMN yang bergerak di bidang pembiayaan berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang memerlukan dana dengan prosedur yang relative sederhana.

⁴⁴ Firdaus, Jasri. 2013. *Mekanisme Pegadaian Syari'ah* (blogspot. Diakses 31 Mei 2013)

d. Berdasarkan PP No. 10 Tahun 1990, Laba yang diperoleh digunakan untuk :

- 1) Dana pembangunan semesta (55%)
- 2) Cadangan umum (20%)
- 3) Cadangan tujuan (5%)
- 4) Dana social (20%)

3. Asumsi Dasar Akuntansi Pegadaian Syariah

Dalam perkembangan praktik lembaga keuangan syariah saat ini telah berjalan cukup cepat baik di level Internasional maupun level nasional. Hal ini terbukti dari kenaikan aset berbagai lembaga keuangan syariah seperti perbankan, asuransi dan pasar modal berkembang dengan pesat. Selain itu perkembangan lembaga keuangan syariah non bank seperti obligasi syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, BMT, LAZIZ juga turut meramalkan perkembangan praktik lembaga keuangan syariah. Dalam menjalankan usahanya hampir semua lembaga keuangan syariah ini membutuhkan informasi keuangannya untuk mengambil keputusan serta membandingkan kinerja antar lembaga keuangan syariah. Informasi keuangan dapat diperoleh melalui proses akuntansi yang berdasarkan standar tertentu dan telah ada prosedur-prosedurnya. Sampai saat ini belum semua Lembaga Keuangan Syariah memiliki Standar Akuntansi agar mendapatkan informasi keuangan yang jelas karena standar akuntansi konvensional yang ada tidak dapat diterapkan dalam lembaga keuangan syariah oleh karena itu dibutuhkan akuntansi lembaga keuangan syariah sebagai pedomannya.

Pada awalnya pegadaian syariah mempergunakan konsep dasar kas (*cash basis*) dalam melakukan pencatatan pendapatan, sedangkan untuk membukukan beban yang dikeluarkan mempergunakan konsep dasar akrual (*accrual basis*). Hal ini dilakukan karena telah terjadi kepastian bahwa pada saat membukukan pendapatan mempergunakan konsep dasar kas, karena pendapatan telah benar-benar diterima.

Asumsi dasar konsep akuntansi keuangan secara umum tidak berbeda dengan asumsi dasar konsep akuntansi pegadaian syariah, yaitu :

- 1) Dasar Akrual, yaitu pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan dicatat dalam catatan akuntansi serta dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode bersangkutan, dan
- 2) Kelangsungan Usaha (*going concern*), yaitu laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha perusahaan dan akan melanjutkan usahanya di masa depan.

G. Tinjauan tentang Akuntansi Ijarah (PSAK 107)

PSAK 107 ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi *ijarah*, serta yang mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad *ijarah* kecuali pada perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah yang menggunakan akad *ijarah*. Pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ini menyesuaikan dengan Fatwa DSN No.44/DSNMUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa yang mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah
- 2) Dalam hal LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.
- 3) Dalam pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.
- 4) Besar ujarah atau fee harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase (%).⁴⁵

a. Defenisi

Adapun beberapa definisi yang terkait telah dijelaskan dalam PSAK 107 ini antara lain sebagai berikut:

- a. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.
- b. Ijarah muntahiyah bittamlik adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan obyek ijarah pada saat tertentu.
- c. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu asset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (arms length transaction).
- d. Obyek ijarah adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud.⁴⁶

⁴⁵ Fatwa DSN No.44/DSNMUI/VIII/2004

b. Karakteristik

Beberapa karakteristik mengenai transaksi Ijarah yang dijelaskan dalam PSAK 107 ini diantaranya :

- 1) Ijarah merupakan sewa-menyewa obyek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat yang terkait kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wa'ad untuk memindahkan kepemilikan dari pemilik (mu'jir) kepada penyewa (musta'jir) pada saat tertentu.
- 2) Perpindahan kepemilikan suatu aset yang diijarahkan dari pemilik kepada penyewa, dalam ijarah muntahiyah bittamlik, dilakukan jika seluruh pembayaran sewa atas objek ijarah yang dialihkan telah diselesaikan dan obyek ijarah telah diserahkan kepada penyewa.
- 3) Pemilik dapat meminta penyewa untuk menyerahkan jaminan atas ijarah untuk menghindari risiko kerugian.
- 4) Jumlah, ukuran, dan jenis obyek ijarah harus jelas diketahui dan tercantum dalam akad.⁴⁷

c. Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah

Dalam *Rahn* emas penentuan biaya dan pendapatan sewa (ijarah) atau penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu *akad ijarah* (PSAK 107) yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah:

⁴⁶Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan* 107, h. 1-2

⁴⁷ *Ibid*, h. 2-3

Pengakuan dan Pengukuran

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yakni:

1. Pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (rahin).
3. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya
4. Pengakuan biaya perbaikan tidak rutin objek ijarah merupakan tanggungan pemilik diakui pada saat terjadinya dan biaya perbaikan tidak rutin dibebankan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya⁴⁸

Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi:

1. Penyajian

Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya baban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.

2. Pengungkapan

Pemilik mengungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah dan ijarah *muntahiyah bit tamlik*, tetapi tidak terbatas, pada :

- a) penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :

⁴⁸ *Ibid*

- 1) keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan).
 - 2) pembatasan-pembatasan.
 - 3) agunan yang digunakan.
- b) Nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi untuk setiap asset ijarah
- c) Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada).

Penyewa mengungkapkan dalam laporan terkait transaksi ijarah dan ijarah *muntahiyah bit tamlik*, tetapi tidak terbatas, pada :

- a) penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada :
- 1) total pembayaran
 - 2) keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan).
 - 3) pembatasan-pembatasan.
 - 4) agunan yang digunakan.
- b) Keberadaan transaksi jual dan ijarah dan keuntungan atau kerugian yang diakui (jika ada transaksi jual dan ijarah)⁴⁹

Ilustrasi jurnal⁵⁰

- a. Pada saat bank menerima barang gadai tidak dijurnal tetapi hanya membuat tanda terima.

⁴⁹ Ibid, h. 7

⁵⁰ Sri Nurhayati, Op.Cit, 258

- b. Pada saat bank membayarkan uang tunai kepada *rahin*

Pembiayaan Gadai/ piutang	Rp xxx
Kas	Rp xxx

- c. Pada saat bank menerima uang untuk biaya sewa atas manfaat aset (sewa tempat) yang merupakan pendapatan sewa bagi bank.

Kas/ piutang	Rp xxx
Pendapatan sewa	Rp xxx

- d. Pengakuan biaya yang dikeluarkan atas pembiayaan gadai syariah

Biaya akad ijarah	Rp xxx
Uang muka dalam rangka akad ijarah	Rp xxx

- e. Pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang.

Kas	Rp xxx
Pembiayaan gadai/ piutang	Rp xxx

- f. Jika pada saat jatuh tempo utang *rahin* tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dijual oleh pihak bank.

- i. Penjualan barang gadai nilainya sama dengan piutang.

Kas	Rp xxx
Pembiayaan gadai/ piutang	Rp xxx

- ii. jika kurang, maka piutangnya masih tersisa sejumlah selisih antara nilai penjualan dengan saldo piutang.

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Gadai Emas Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru atau disebut juga pembiayaan Rahn merupakan penyerahan jaminan / hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) kepada pegadaian sebagai jaminan atas pembiayaan (*qardh*) yang diterima.

Selain itu gadai emas di Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru memiliki beberapa keunggulan diantaranya :

1. Proses menggadai yang sangat sederhana dan tidak berbelit-belit dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
2. Murah dan tarif dihitung secara per 10 hari.
3. Jangka waktu 4 bulan dan bisa diperpanjang. Setiap kali perpanjangan *rahn*, nasabah wajib membayar biaya perawatan dan pemeliharaan sesuai tarif ujah yang berlaku dan Murtahin (Pegadaian) wajib melakukan hertaksasi (penaksiran) atas barang yang dijaminkan sesuai dengan harga pasar yang berlaku.
4. Pembiayaan gadai diberikan sebesar 95% untuk emas lantakan dan 92-93% untuk emas perhiasan
5. Barang agunan aman karena diasuransikan.

Pihak Perum Pegadaian Syari'ah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru menyatakan bahwa dalam produk gadai ini tidak mengambil manfaat dari *Marhun* yang dijaminkan nasabah sehingga dapat dikatakan bahwa pegadaian memberikan

“pinjaman dengan jaminan” emas kepada nasabah. Adapula emas yang digadaikan adalah emas dengan kadar 16-24 karat dengan maksimum pinjaman 95% dari nilai taksiran serta biaya penitipan yang ditentukan oleh kantor pusat dan kemudian dikirimkan ke kantor cabang⁵¹

Biaya-biaya yang ditetapkan oleh pihak Perum Pegadaian Syari’ah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru adalah sebagai berikut⁵² :

1. Biaya Perawatan dan Pemeliharaan

Biaya perawatan dan pemeliharaan tergantung golongan pembiayaan dari nilai taksiran barang untuk masa empat bulan dan dihitung per 10 hari. Biaya ini dibayar pada saat melunasi/perpanjangan.

2. Biaya Administrasi (dibayar dimuka)

- a. Golongan A 50.000 – 500.000 sebesar 2000
- b. Golongan B1 550.000 – 1.000.000 sebesar 8000
- c. Golongan B2 1.050.000 – 2.500.000 sebesar 15.000
- d. Golongan B3 2.550.000 – 5.000.000 sebesar 25.000
- e. Golongan C1 5.100.000 – 10.000.000 sebesar 40.000
- f. Golongan C2 10.100.000 – 15.000.000 sebesar 60.000
- g. Golongan C3 15.100.000 – 20.000.000 sebesar 80.000
- h. Golongan D 20.100.000 – keatas sebesar 100.000

A. Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah

Dalam *Rahn* emas penentuan biaya dan pendapatan sewa (ijarah) atau penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu

⁵¹ Slamet (Pimpinan Upc Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani), *Wawancara* 25 Mei 2013

⁵² Afis (Fungsional Pegadaian Syari’ah Cabang Ahmad Yani) *Wawancara* 14 Juni 2013

akad ijarah (PSAK 107) yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah:

Pengakuan dan Pengukuran

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yakni⁵³ :

1. Pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (rahin).
3. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.

Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi⁵⁴:

1. Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya baban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.
2. Pengungkapan, *murtahin* mengungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah dan ijarah *muntahiyah bit tamlik*.
 - a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a) Keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan).

⁵³ katan Akuntansi Indonesia, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 107), h. 3

⁵⁴ *Ibid*, h. 7

- b) Pembatasan-pembatasan.
- c) Agunan yang digunakan.
- b. Keberadaan transaksi jual-dan-ijarah (jika ada).

Ilustrasi jurnal

- a) pada saat pegadaian menerima barang gadai tidak di jurnal tetapi hanya membuat tanda terima.

- b) Pada saat pegadaian membayarkan uang tunai kepada rahin

Pembiayaan Gadai/ piutang	Rp xxx
Kas	Rp xxx

- c) Pada saat Pegadaian menerima uang untuk biaya sewa atas manfaat aset (sewa tempat) yang merupakan pendapatan sewa bagi pegadaian

Kas/ piutang	Rp xxx
Pendapatan sewa	Rp xxx

- d) Pada saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang.

Kas	Rp xxx
Pembiayaan gadai/ piutang	Rp xxx

- e) Jika pada saat jatuh tempo utang *rahin* tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dijual oleh pihak bank.

- i. Penjualan barang gadai nilainya sama dengan piutang.

Kas	Rp xxx
Pembiayaan gadai/ piutang	Rp xxx

- ii. Jika kurang, maka piutangnya masih tersisa sejumlah selisih antara nilai penjualan dengan saldo piutang.

- iii. Jika lebih, maka sisa dari pembayaran utang ke pembiayaan gadai akan dikembalikan kepada nasabah, setelah mengurangi biaya untuk penjualan barang gadai tersebut.⁵⁵

Untuk lebih mudah dipahami, berikut ini penulis akan memperlihatkan proses pembiayaan gadai emas beserta perlakuan akuntansinya yang diterapkan oleh Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru.

Contoh Pembiayaan Gadai Emas Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru :

Ibu Nella menggadaikan emasnya di Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru untuk keperluan yang mendesak yang harus dia penuhi. Emas yang berkadar 23 karat dengan berat 2.5 gram dan dengan nilai taksiran pada tanggal 15 Juni sebesar Rp. 1.046.979. Perhitungan besar biaya penitipan (sewa) yang harus dibayarkan Ibu Nella dan jumlah pinjaman yang maksimum dapat dipinjam olehnya yaitu:

Maksimum pinjaman yang ditetapkan Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru =

$$92\% \times \text{Rp. } 1.046.979 = \text{Rp. } 963.220 \text{ dibulatkan menjadi } 950.000$$

Ibu Nella bisa mendapatkan pinjaman maksimum senilai Rp 950.000

Perhitungan biaya penitipan yang dilakukan pihak Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru yang standar yaitu hitungan per sepuluh hari dengan jangka waktu empat bulan jadi $8.52\% (0.710\% \text{ per } 10 \text{ hari}) \times (120 \text{ hari}) = 89.300$. Selain itu, terdapat juga biaya-biaya lain yang telah ditetapkan

⁵⁵ Sri Nurhayati. *Op, Cit.* h. 258

seperti terdapat juga biaya administrasi untuk emas yang berat 2.5 gram sejumlah Rp. 8.000.⁵⁶

Berikut ini akan diuraikan tentang pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai emas syariah pada kejadian-kejadian yang penting sebagai berikut:

- 1) Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru mengakui pembiayaan *gadai syariah* pada saat akad terjadi dan Pegadaian menyerahkan kas kepada nasabah yaitu saat Pegadaian menandatangani dan mencairkan dana sebesar pokok pembiayaan (pinjaman) sesuai dengan kesepakatan pihak pegadaian dengan nasabah. Pengakuan tersebut sesuai dengan PSAK No.107 part 1 yang menyatakan bahwa pembiayaan gadai emas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Pada saat akad *gadai syariah* telah disetujui dan barang gadai telah diterima oleh pihak pegadaian, maka pembiayaan *gadai syariah* diukur sebesar jumlah pembiayaan yang telah diberikan pada saat penyerahan pinjaman tersebut.

Akan tetapi, jika ditinjau lebih dalam pada prakteknya, pencairan yang dilakukan pegadaian konvensional diartikan sebagai pemindahan saldo sebesar pokok kredit (pinjaman) dari rekening pegadaian ke rekening nasabah. Nasabah belum menerima dana dalam bentuk uang tunai sehingga dapat diartikan bahwa pencairan tersebut hanya bersifat simbolis saja. Sedangkan, sesuai prinsip syariah bahwa pengakuan atas aktiva harus dilakukan ketika sesuatu hal telah benar-benar terjadi dan pengakuan dan

⁵⁶ www.Pegadaian.co.id

pencatatan baru dilakukan pada saat terjadinya perpindahan aktiva (baik berupa kas ataupun non-kas) dari pihak pegadaian sebagai pemilik dana kepada nasabah. Hal ini dilakukan karena sesuai dengan muamalah, pegadaian syariah cenderung menggunakan dasar kas (*cash basis*) dalam melakukan pencatatan akuntansinya karena merupakan cara yang paling manusiawi.

Berbeda dengan pegadaian konvensional yang menggunakan dasar akrual (*accrual basis*). Penggadai juga dibebankan biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh pihak pegadaian dan dibayarkan saat akad pembiayaan terjadi. Untuk contoh kasus Ibu Nella di atas, Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru akan mengakui dan mengukur pembiayaan *gadai syariah*, pada saat pegadaian menyerahkan pinjaman dan menerima barang gadai dengan jurnal sebagai berikut:

- a. Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah

Dr. Pembiayaan qardh	Rp. 950.000	
Kr. Kas		Rp. 950.000

Jurnal pada saat nasabah membayar administrasi:

Dr. Kas	Rp. 8.000	
Kr. Pendapatan biaya administrasi		Rp. 8.000

- b. Pada saat pelunasan pembiayaan gadai syariah

Dr. Kas	Rp. 950.000	
Kr. Pembiayaan qardh		Rp. 950.000
Dr. Kas	Rp. 89.300	
Kr. Pendapatan Jasa Sewa tempat		Rp. 89.300

2) Pada saat penerimaan angsuran atau cicilan

Sesuai dengan syariah Islam pegadaian sebagai mitra nasabah tidak diperbolehkan menuntut nasabah melakukan pembayaran yang memberatkan keadaan financial nasabah. Dalam pembiayaan *gadai emas* pembayaran kewajiban dapat dilakukan pada saat jatuh tempo yaitu perempat bulan setelah akad. Sedangkan, pembayaran dengan sistem angsuran pada pembiayaan *gadai syariah* juga dapat dilakukan sesuai dengan akad pada awal transaksi. Jika dalam proses berlangsungnya pembiayaan *gadai syariah*, nasabah mengalami kesulitan keuangan, maka pegadaian melakukan perpanjangan masa pembiayaan dan biaya sewa akan kembali dihitung sama sebelum perpanjangan masa pembiayaan yang harus dibayarkan oleh nasabah. Kejadian ini dicatat apabila biaya sewa telah diterima oleh pihak pegadaian sesuai dengan pencatatan akuntansi yang dilakukan pegadaian syariah yang menggunakan dasar kas (*cash basis*). Apabila terdapat penerimaan angsuran atau pembayaran maka pihak pegadaian mengakuinya sebagai pengurang pokok pembiayaan dan mengakui pendapatan sewa atas biaya sewa yang telah dibayarkan oleh nasabah yang telah menggunakan jasanya. Namun, jika jumlah yang dibayarkan jumlahnya kurang dari besarnya angsuran yang seharusnya dibayar, maka terlebih dahulu pegadaian mengakuinya sebagai pendapatan sewa atas jasa titip yang telah diberikan oleh pegadaian kemudian sisanya diakui sebagai pengurang pokok dari kredit (pinjaman).

Untuk kasus Ibu Nella di atas, maka setiap pembayaran angsuran atau cicilan atas pembiayaan *gadai syariah* diperlakukan sebagai pengurang/ mengurangi pembiayaan *gadai syariah*. Atas pembayaran ini pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru mencatat sebagai berikut:

- a. Pada saat terjadinya akad pembiayaan gadai syariah

Dr. Pembiayaan qardh	Rp. 950.000	
Kr. Kas		Rp 9500.000

Jurnal pada saat nasabah membayar administrasi:

Dr. Kas	Rp. 8.000	
Kr. Pendapatan biaya administrasi		Rp. 8.000

- b. Pada saat angsuran pembiayaan gadai syariah

Angsuran bulan 1

Dr. Kas/rekening Ibu Sinta	Rp. 237.500	
Kr. Pembiayaan <i>qardh</i>		Rp. 237.500

Angsuran bulan 2

Dr. Kas/rekening Ibu Sinta	Rp. 237.500	
Kr. Pembiayaan <i>qardh</i>		Rp. 237.500

Angsuran bulan ke-3

Dr. Kas/rekening Ibu Sinta	Rp. 237.500	
Kr. Pembiayaan <i>qardh</i>		Rp. 237.500

- c. Pada saat pelunasan pembiayaan gadai syariah

Pada Angsuran bulan ke-4

Dr. Kas/rekening Ibu Sinta	Rp. 237.500	
Kr. Pembiayaan <i>qardh</i>		Rp. 237.500
Dr. Kas	Rp. 89.300	
Kr. Pendapatan Jasa Sewa tempat		Rp. 89.300

Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan

Dalam PSAK 107 terdapat ketentuan untuk Pengakuan dan pengukuran pendapatan dari sudut pandang murtahin/LKS yakni⁵⁷ :

1. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (*rahin*).
2. Piutang atau kas dukur dan dinilai sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan.

Pada Pegadaian konvensional, pendapatan disini diartikan sebagai pendapatan bunga. Di Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru sebagai pegadaian yang berprinsip syariah, pendapatan yang dimaksud dalam pembiayaan gadai syariah khususnya adalah pendapatan sewa. Seperti diketahui bahwa pegadaian konvensional menggunakan system bunga yang besarnya telah ditentukan di awal perjanjian, sedangkan Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dalam produk pembiayaan gadai syariah menggunakan sistem biaya sewa yang diperhitungkan sesuai dengan berat emas yang digadaikan nasabah untuk dititip ke pegadaian, bukan berdasar besarnya jumlah pinjaman yang diberikan. Terdapatnya perbedaan tersebut tentu menimbulkan pengakuan berbeda antara keduanya.

Adapun syarat yang ditentukan oleh Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dalam pengakuan pendapatan yang diperolehnya. Pertama, pegadaian sudah memiliki hak untuk menerima pendapatan tersebut setelah penyerahan selesai dilakukan kepada nasabah. Kedua, kewajiban membayar atau

⁵⁷ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Op. Cit*, h. 4

memenuhi pendapatan tersebut sudah jelas siapa pihak yang bertanggung jawab yang dapat diwajibkan memenuhi kewajibannya kepada pegadaian.⁵⁸

Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru mengakui pendapatan sewa pada saat pendapatan tersebut diterima yaitu ketika nasabah membayar biaya sewa. Dasar pengakuan pendapatan adalah dasar kas (*cash basis*). Sebab ditinjau dari segi muamalahnya, dasar kas merupakan prinsip yang sudah seharusnya diterapkan dalam Islam. Berdasarkan pedoman tersebut, maka Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru mengakui pendapatan dalam kegiatan pembiayaan gadai syariah hanya terdiri dari pendapatan sewa dan pendapatan dari biaya administrasi.

1) Pada saat perpanjangan pembiayaan gadai syariah

Dalam proses pembiayaan gadai syariah dalam suatu kondisi nasabah tidak bisa melunasi kewajibannya dalam jangka waktu jatuh tempo maka akan diberikan perpanjangan masa pembayaran sesuai dengan kesepakatan nasabah.⁵⁹ Pada saat Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru menerima pelunasan pembayaran biaya sewa saat jatuh tempo dari nasabah maka pada saat itu diakui sebagai pendapatan, maka Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru akan mencatat ke dalam jurnal sebagai berikut:

a. Pelunasan jasa sewa untuk jangka waktu 4 bulan pertama

Dr. Kas	Rp. 89.300	
Kr. Pendapatan Jasa Sewa tempat		Rp. 89.300

⁵⁸ Afis (Fungsional Pegadaian Syari'ah Cabang Ahmad Yani) Wawancara 14 Juni 2013

⁵⁹ Slamet (Pimpinan UPC Pegadaian Syari'ah Cabang Ahmad Yani), Wawancara 15 Mei

b. Pelunasan pembiayaan gadai syariah dan sewa tempat 4 bulan kedua

Dr. Kas	Rp. 950.000	
Kr. Pembiayaan qardh		Rp 950.000
Dr. Kas	Rp. 97.300	
Kr. Pendapatan Jasa Sewa tempat		Rp. 97.300

2) Pada saat terjadi pelelangan barang gadai

Dalam proses pembiayaan gadai syariah dalam suatu kondisi nasabah tidak biasa melunasi kewajibannya dalam jangka waktu jatuh tempo dan sudah diberikan perpanjangan masa pembayaran tapi belum dapat memenuhi kewajibannya, maka akan diperingatkan dalam jangka lima hari jika nasabah belum dapat melunasi maka pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru akan melakukan lelang terhadap barang gadai.⁶⁰ Dan pada saat barang gadai dilelang diakui sebesar jumlah pinjaman setelah dikurangi biaya-biaya yang terkait saat proses pembiayaan gadai syariah (jangka waktu empat bulan) yang harga lelangnya sebesar Rp. 1.046.000 sampai barang tersebut dilelang. Adapun kelebihan hasil lelang setelah dikurangi pokok pinjaman dan biaya sewa, maka akan diberikan kepada nasabah kembali, maka pihak pegadaian mencatatnya berdasar kasus Ibu Nella sebagai berikut:

a. Pelelangan barang gadai (emas)

Dr. Kas	Rp. 1.046.000	
Kr. Dana nasabah sementara		Rp. 1.0460.000

b. Pelunasan

Dr. Dana nasabah sementara	Rp. 1.046.000	
Kr. Kas/ Rekening ibu Nella		Rp. 6.700
Kr. Pembiayaan qard		Rp. 950.000
Kr. Pendapatan Jasa Sewa tempat		Rp. 89.300

⁶⁰ Slamet (Pimpinan UPC Pegadaian Syari'ah Cabang Ahmad Yani), Wawancara 15 Mei 2013

Jika terjadi kekurangan / kerugian pada pelelangan

a. Pelelangan barang gadai (emas)

Dr. Kas	Rp. 1.015.000	
Kr. Dana nasabah sementara		Rp. 1.015.000

b. Pelunasan

Dr. Dana nasabah sementara	Rp. 1.015.000	
Kr. Pembiayaan qard		Rp. 950.000
Kr. Pendapatan Jasa Sewa tempat		Rp. 89.300
Dr. Penghapusan piutang pemi.qard	Rp. 24.300	
Kr. Kerugian piutang ijarah		(Rp. 24.300)

Akan tetapi pada kenyataanya, untuk kerugian bagi pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru belum pernah terjadi. Hal ini dikarenakan Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru melakukan pelelangan dibawah tangan sehingga harga jual barang gadai emas setara atau diatas harga nilai taksiran emas tersebut.

Jadi Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru telah menerapkan proses pengakuan dan pengukuran untuk pendapatan dengan cara, a) Pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya. b) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (rahin). Hal ini menunjukkan adanya kesesuaian dengan pedoman PSAK 107 tentang akad Ijarah.

B. Kesesuaian Praktik Gadai Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kesesuaian antara praktik gadai syariaah dengan landasan gadai emas syariah bagi lembaga keuangan syariah yaitu Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas syariaah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 (*Rahn Emas*)

Menurut Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas syariaah harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
2. Rahn emas boleh digunakan berdasarkan prinsip *Ar-Rahn*.
3. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
4. Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Adapun deskriptif dari penerapan fatwa MUI tersebut oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dalam proses gadai emas syariaah adalah sebagai berikut :

a. Jaminan (barang gadai)

Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dalam pembiayaan *gadai syariaah* akan menahan barang penggadai sampai semua utang (pinjaman) dilunasi sebagai jaminan pinjaman yang telah diberikan. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN No.26/DSNMUI/III/2002 bagian pertama yang menyatakan *rahn emas* dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002), dimana Fatwa DSN

No.25/DSN-MUI/III/2002 bagian pertama menyatakan bahwa *murtahin* (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

Para ulama fiqh juga menyatakan bahwa *rahn* baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan penerima gadai (*murtahin*) dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (*rahin*). Kesempurnaan *rahn* oleh ulama disebut sebagai *alqabdh al-marhun* barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu telah dikuasai oleh murtahin maka akad *rahn* itu mengikat kedua belah pihak.

Oleh karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan.

b. Biaya administrasi dan pemeliharaan

Barang gadai hanya sebagai jaminan pinjaman yang telah diberikan Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru yang tidak akan mengambil manfaatnya. Pemanfaatannya itu hanya berupa biaya sewa (yang disebut *ujrah*). Pendapatan atau keuntungan diperoleh dari biaya sewa yang telah dikeluarkannya atas barang gadaian dan pihak penggadaian akan membayar sejumlah yang telah ditetapkan. Biaya tersebut harus dibayar di depan atau pada saat pinjaman dicairkan guna untuk menghindari atau tidak memperbolehkan pihak pegadaian mengambil keuntungan lagi dari akad gadai syariah ini. Di mana akad gadai adalah

transaksi *pinjam meminjam (qardh)* yang bersifat ta'barru yang berarti kebaikan atau tolong - menolong.

Biaya-biaya tersebut antara lain:

1. Biaya Administrasi

Menurut beberapa ulama bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan merupakan tanggungan *rahin* (penggadai). Biaya administrasi merupakan ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan penggadai (*rahin*) sehingga biaya administrasi termasuk menjadi tanggungan penggadai. Sebagaimana dalam Fatwa DSN No.26/DSNMUI/ II/2002 bagian pertama yang menyatakan *rahn emas* dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002), dimana Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 bagian ketiga yang menyatakan pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*. Namun, dapat juga dilakukan oleh *murtahin* (penerima gadai). Sedangkan biaya pemeliharaan dan administrasi tetap menjadi kewajiban *rahin*. Perhitungan rincian biaya administrasinya dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru sendiri. Apabila pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru telah menghitung total biaya administrasi maka penggadai wajib mengganti biaya administrasi tersebut dan pihak pegadaian harus merinci biaya administrasi tersebut kepada *rahin*.⁶¹

⁶¹ Afis (Fungsional Pegadaian Syari'ah Cabang Ahmad Yani), *Wawancara* 14 Juni 2013

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSNMUI/III/2002 bagian ketiga yang menyatakan bahwa ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan⁶². Artinya, penggadai harus mengetahui informasi besarnya rincian biaya dan pengeluaran apa saja yang dikeluarkan oleh pihak pegadaian dalam melaksanakan akad gadai tersebut.

Misalnya, biaya materai, jasa penaksiran, formulir akad, fotokopi, dll. Namun, biasanya ada pihak pegadaian hanya menginformasikan total biaya keseluruhan saja yang harus dibayar oleh penggadai tanpa menyebutkan rinciannya. Keterbukaan rincian biaya administrasi ini sangat diperlukan yang kaitannya dengan *ridha hi ridha*, di mana biaya administrasi ini dibebankan kepada penggadai.

2. Biaya Pemeliharaan (sewa tempat).

Karena pada dasarnya penggadai (*rahin*) masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut sehingga dia bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya. Termasuk biaya pemeliharaan yang merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai. Sesuai dengan pendapat *para jumhur* ulama bahwa biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai (*rahin*).

⁶² Fatwa DSN No.26/DSNMUI/III/2002, h. 3

Sesuai dengan Fatwa DSN NO.26/DSN-MUI/III/2002 bagian keempat yang menyatakan bahwa biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah (sewa).⁶³ Artinya, penggadai (*rahin*) menyewa tempat di pegadaian untuk menyimpan dan menitipkan barang gadainya, kemudian pegadaian akan menetapkan biaya sewa tempat barang gadai ini.

Dengan kata lain, dalam hal ini pihak Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru menyediakan jasa tempat menyimpan atau memelihara barang gadai kepada penggadai (*rahin*) hingga jangka waktu gadai berakhir. Biaya pemeliharaan ini dapat berupa biaya sewa tempat, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, dan biaya lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau menyimpan barang gadai tersebut. Dengan akad ijarah dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadai pegadaian dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal.⁶⁴

Pihak pegadaian akan memperoleh *fee* atau upah atas jasa sewa yang telah diberikan kepada penggadai (*rahin*). Dengan demikian, gadai emas syariah sangat bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai secara cepat. Selain itu, bagi pihak pegadaian sendiri sebagai penyedia jasa gadai emas syariah hanya akan memperoleh pemasukan atau keuntungan *dari jasa penitipan (jasa sewa)* atas barang gadai, bukan dari kegiatan gadai itu sendiri.

Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru sebagai pegadaian syariah sudah seharusnya menjalankan nilai – nilai syariah. Sesuai dengan syariah

⁶³ Fatwa, *Op. Cit*

⁶⁴ Slamet (Pimpinan UPC Pegadaian Syari'ah Cabang Ahmad Yani), *Wawancara* 15 Mei 2013

Islam bahwa posisi pegadaian sebagai mitra berarti pegadaian tidak diperbolehkan menuntut nasabah melakukan pembayaran yang memberatkan keadaan finansial nasabah (penggadai). Apabila saat proses pembiayaan *gadai emas*, penggadai mengalami kesulitan dengan kondisi finansialnya, maka pegadaian melakukan perpanjangan masa pembiayaan. Namun, jika dalam tempo atau jangka waktu yang ditentukan penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya maka Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru akan menjual/melelang barang gadai tersebut untuk melunasi utang penggadai, biaya administrasi dan pemeliharaan dan biaya penjualan/pelelangan.⁶⁵

Kondisi di mana kelebihan penjualan/pelelangan akan diberikan kembali kepada penggadai (*murtahin*), sedangkan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn* yang berpedoman pada Fatwa DSN No.26/DSNMUI/III/2002 bagian pertama yang menyatakan *rahn emas* dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn* (lihat Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002), dimana Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 bagian kelima.

Jadi produk gadai emas syariah ini didukung oleh fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) N0.26/DSN-MUI/III/2002, tentang Rahn Emas. Produk ini dinilai sebagai produk pegadaian yang sesuai dengan syariah Islam (*syariah compliance*) karena bebas dari riba. Selain itu layanan ini juga memberikan keamanan atas penitipan barang jaminan emas karena dikelola dengan standar keamanan pegadaian dan mendapat perlindungan asuransi.

⁶⁵ Slamet (Pimpinan UPC Pegadaian Syari'ah Cabang Ahmad Yani), Wawancara 15 Mei 2013

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan data-data yang telah diuraikan pada bab sebelumnya yang berkaitan dengan rumusan masalah, dapat diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut

- 1) Perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah *rahn* pada Perum Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru sudah sesuai PSAK 107 (akad *Ijarah*). Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru telah menerapkan proses pengakuan dan pengukuran untuk pendapatan dengan cara, a) Pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya. b) Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (rahin).
- 2) Pembiayaan gadai emas syariah pada Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSNMUI/ III/2002.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan hasil evaluasi yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menyarankan bahwa pada pembiayaan gadai emas syariah yang merupakan produk andalan Pegadaian Syariah Cabang Ahmad Yani Pekanbaru saat ini harus lebih dikembangkan mengingat dari pencapaian baik

yang diraihnya. Selain itu masyarakat juga sangat mendukung produk *rahn* ini yang juga dapat membantu kesulitan finansial mereka dengan mudah dan cepat, sehingga dapat meningkatkan perekonomian di sector rill.

Akan tetapi dalam hal hukum Islam berdasarkan dari penjelasan sebelumnya, unsur utama transaksi gadai emas pada dasarnya adalah transaksi pinjaman uang (*qardh*) oleh nasabah kepada pegadaian. kalau transaksinya *Qardh* maka tidak sepatutnya mengambil manfaat dari harta yang pinjamkan tersebut. Karena itu solusinya adalah dengan menggunakan mekanisme transaksi jual-beli (*murabahah*), kerja sama (*syirkah*) dengan menjalankan seluruh ketentuan *syara* yang berkaitan dengan itu.

Penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini banyak memiliki kelemahan dan kekurangan karena minimnya data yang berhasil diperoleh di lapangan. Minimnya data ini terjadi karena data kuantitatif yang berupa angka-angka atau nominal tidak bisa dipublikasikan yang sudah menjadi ketentuan pihak pegadaian. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian kedepannya yang terkait dengan pegadaian agar memberikan kemudahan untuk mengolah data-data yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin, *Hukum Ar-Rahn*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008
- Antonio, Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Departemen Agama, *Al-qur'an Nur Karim*, Bandung : Diponegoro, 2000.
- Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, "*Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI*". Jakarta : CV. Gung Persada, 2006
- Hartanto, Dicki, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2012.
- Huda, Nurul & Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*. Jakarta : Kencana. 2010
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. (PSAK 107). Tentang Akuntansi Ijarah. Jakarta : Salemba Empat, 2007
- Jafri, A. Syafi'I, *Fiqh Muamalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008
- Karim, Adiwarman A, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006.
- Karim, Adiwarman A, *Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008
- Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.
- Mawardi, *Lembaga Perekonomian Umat*, Pekanbaru : Suska Press, 2008.
- Muhammad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta : UII Press Yogyakarta, 2000
- Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, Jakarta: Salemba Empat, 2002
- Nurhayati, Sri, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2009
- Niswonger, dkk, *Prinsip-prinsip Akuntansi*, Jakarta: Erlangga, 1999
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.

- Sutedi, Adrian, *Hukum Gadai Syari'ah*, Bandung : Alfabeta, 2011.
- Sulaiman, Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Al Gesindo, 1994
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Purnamasari, Irma Devita, *Akad Syariah*, Bandung : Kaifa, 2011
- Triwuyono, Iwan, *Perspektif Metodologi Teori Akuntansi Syariah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006
- Wiyono, Slamet & Taufan Maulani, *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta : Mitra Wacana Media, 2012.
- Yadiati & Wahyudi, *Pengantar Akuntansi*, Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 2008.